

SKRIPSI

PENGARUH INDIKATOR MAKROEKONOMI, UPAH MINIMUM DAN DEMOGRAFIS TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA

ANDI SEPTIAN EKA PRASETYO



**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

PENGARUH INDIKATOR MAKROEKONOMI, UPAH MINIMUM DAN DEMOGRAFIS TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA

sebagai salah satu persyaratan untuk memperoleh
gelar Sarjana Ekonomi

disusun dan diajukan oleh

ANDI SEPTIAN EKA PRASETYO



kepada

**DEPARTEMEN ILMU EKONOMI
FAKULTAS EKONOMI DAN BISNIS
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2017**

SKRIPSI

PENGARUH INDIKATOR MAKROEKONOMI, UPAH MINIMUM DAN DEMOGRAFIS TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA

disusun dan diajukan oleh

ANDI SEPTIAN EKA PRASETYO
A 111 11 262

telah dipertahankan dalam ujian skripsi

Makassar, 3 Oktober 2017

Pembimbing I



Dr. H.. Madris, SE., DPS., M.Si
NIP. 19590306 198503 1 002

Pembimbing II



Dr. Sabir, SE., MSi
NIP. 19740715 200212 1 003

**Ketua Jurusan Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin**



Drs. Muh. Yusri Zamhuri, M.A., Ph.D
NIP. 19610806 198903 1 004

SKRIPSI

PENGARUH INDIKATOR MAKROEKONOMI, UPAH MINIMUM DAN DEMOGRAFIS TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA

disusun dan diajukan oleh
ANDI SEPTIAN EKA PRASETYO
A 111 11 262

telah dipertahankan dalam sidang ujian skripsi
pada tanggal 3 Oktober 2017
dinyatakan telah memenuhi syarat kelulusan

No. Nama Penguji	Jabatan	Tanda Tangan
1. Dr. Madris, DPS., M. Si.	1. Ketua	1. 
2. Dr. Sabir, SE., M.Si.	2. Sekertaris	2. 
3. Muh. Yusri Zamhuri, SE., MA. Ph.D.	3. Anggota	3. 
4. Dr. Nursini, SE., MA.	4. Anggota	4. 
5. Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si.	5. Anggota	5. 

Ketua Departemen Ilmu Ekonomi
Fakultas Ekonomi dan Bisnis
Universitas Hasanuddin



Drs. Muh. Yusri Zamhuri, M.A., Ph.D
NIP. 19610806 198903 1 004

PERNYATAAN KEASLIAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini,

Nama : Andi Septian Eka Prasetyo

NIM : A 111 11 262

Jurusan/Program Studi : Ilmu Ekonomi/Starata Satu (S1)

dengan ini menyatakan yang sebenar-benarnya bahwa skripsi yang berjudul

PENGARUH INDIKATOR MAKROEKONOMI, UPAH MINIMUM DAN DEMOGRAFIS TERHADAP PENGANGGURAN DI INDONESIA

Adalah karya ilmiah saya sendiri dan sepanjang pengetahuan saya di dalam naskah skripsi ini tidak terdapat karya ilmiah yang pernah diajukan oleh orang lain untuk memperoleh gelar akademik di suatu perguruan tinggi, dan tidak terdapat karya atau pendapat yang pernah ditulis atau diterbitkan oleh orang lain, kecuali yang tertulis dikutip dalam naskah ini dan disebutkan dalam sumber kutipan dan daftar pustaka.

Apabila dikemudian hari ternyata di dalam naskah skripsi ini dapat dibuktikan terdapat unsur-unsur jiplakan, saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut dan diproses sesuai peraturan perundang-undangan yang berlaku (UU No.20 Tahun 2003, pasal 5 ayat 2 dan pasal 70)

Makassar, 19 Oktober 2017

Yang membuat pernyataan,



Septian
Andi Septian Eka Prasetyo

PRAKATA

Puji syukur dan kemuliaan yang agung penulis ucapkan kepada ALLAH SWT, atas Rahmat, Anugerah dan Perlindungan-Nya penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“Pengaruh Indikator Makroekonomi, Upah Minimum dan Demografis terhadap Pengangguran di Indonesia”**. Sebagai salah satu syarat untuk menyelesaikan program Sarjana Strata Satu (S1) pada Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin dengan baik. Dalam proses penulisan skripsi ini, penulis banyak mendapat dukungan, bantuan, dan masukan dari berbagai pihak baik langsung maupun tidak langsung. Pada kesempatan ini penulis hendak mengucapkan terimakasih kepada:

1. Bapak Prof. Dr. H. Gagaring Pagalung, SE., MS.Ak selaku Dekan Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin.
2. Bapak Drs. Muh.Yusri Zamhuri, MA., Ph.D selaku Ketua Departemen Ilmu Ekonomi Universitas Hasanuddin.
3. Bapak Dr. Madris, DPS., M. Si. Selaku pembimbing I dan bapak Dr. Sabir, SE., M.Si. selaku pembimbing II, yang telah membantu penulis sehingga dapat menyelesaikan skripsi ini.
4. Dosen Penguji bapak Drs. Muh.Yusri Zamhuri, MA., Ph.D., ibu Dr. Nursini, SE., MA., ibu Dr. Retno Fitrianti, SE., M.Si., terimah kasih atas saran dan masukan yang telah diberikan sehingga penulis dapat memperbaiki skripsi ini menjadi lebih baik.
5. Terima kasih kepada kanda Spultura (Puad dan Dedar), teman – teman Rega11ans terkhusus Azhadi Tonang sang mantan ketua HIMAJIE-ku, Dayat, Ardi, Zuhail dan Yusri teman ngopi sekaligus cerita – cerita, Tauria

Tory yang punya swalayan motor di jalan berua, Agung muslim dan Rio Aristo teman seperjuangan waktu maba, Uyuun sodaraku seiman dan setanah air , Richard Pasolang teman se-departemen pengaderan waktu mengurus, Cewe – cewe Rega11ans terkhusus Adilah, Jihan dan Ria yang selalu memberikan dukungan, untuk Espada (Ali, Oni, Ratih Tito dan Haidir), Adik – adik Spark terkhusus (Jasman, Dwiki, Arung, Izza, Septi, Imachun, Fani, Mini, Merlyn, dan Putri), Adik - adik Primes terkhusus (Dadang ketua Himajie periode 2017 – 2018, geng cabe Rifka,Ayu,Ana dan Dillah), Seluruh Adik – adik Antar-es andalan gue, terspesial paling tersangat andalan (Putri Indah Sugiarto, Syfa dan Wulan)

6. Keluarga Besar OLH MAHESA (Kak iccang sang filsuf, Franky, Gery, Ojan, Uca, Amran, Rafa, Misna, Caca, Uli, Sigit, Ikki, RPM, Dillah, Wito dan Asraf Sinclair)
7. Teman – teman Mapperwa (Romi, Anti, Akbar, Irvan Sahali, Syamsul, Fadel, Parman, Syam dan Hilda)

Akhirnya, penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu dalam menyelesaikan skripsi ini. Semoga skripsi ini bermanfaat.

Makassar, 19 Oktober 2017

Andi Septian Eka Prasetyo

ABSTRAK

Pengaruh Indikator Makroekonomi, Upah Minimum dan Demografis terhadap Pengangguran di Indonesia

Andi Septian

Madris

Sabir

Tujuan penelitian untuk mengukur seberapa besar Pengaruh Indikator Makroekonomi, Upah Minimum dan Demografis terhadap Pengangguran di Indonesia periode 2011 – 2015. Adapun variabel yang diamati dalam penelitian ini adalah Pengangguran sebagai variabel dependen, kemudian Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum dan Pertumbuhan Penduduk sebagai variabel independen. Model menggunakan data panel yang dihitung melalui pendekatan Common Effect Model dengan menggunakan aplikasi Eviews 8. Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa 38 persen dari variasi independen dalam penelitian ini dapat menjelaskan variabel Pengangguran di Indonesia, sedangkan 62 persen sisanya dipengaruhi oleh faktor – faktor lain di luar model estimasi. Hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel independen Pertumbuhan Ekonomi, Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum dan Pertumbuhan Penduduk berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di Indonesia. Pertumbuhan Ekonomi dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif, Upah Minimum dan Pertumbuhan Penduduk berpengaruh positif. Untuk variabel Investasi tidak berpengaruh signifikan terhadap Pengangguran di Indonesia.

Kata Kunci : Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi, Invesati, Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum, Pertumbuhan Penduduk

ABSTRACT

Influence Indicator Macroeconomics, Minimum Wage and Demographic For Unemployment in Indonesia

Andi Septian

Madris

Sabir

Research objectives to measure and analyze how much influence indicator Macroeconomics, Minimum Wage and Demographic for Unemployment in Indonesia 2011 – 2015 period. The variable were observed in this study were Unemployment as the dependent variable, then the Economic Growth, Investment, Government Spending, Minimum Wage and Population Growth as independent variables. The model uses panel data calculated approach accompanied Common Effect Model using Eviews 8 application. The results of this study showed that 38 percent of the variation of the independent variables in this study may explain the variable Unemployment in Indonesia, while 62 percent were affected by other factors outside the model estimation. The results that independent variables Economic Growth, Government Spending, Minimum Wage and Population Growth significant effect on Unemployment in Indonesia. Economic Growth and Government Spending negative effect, While Minimum Wage and Population Growth positive effect. For Independent variable Investment not have significant effect on Unemployment in Indonesia.

Keywords : Unemployment, Economic Growth, Investment, Government Spending, Minimum Wage, Population Growth

DAFTAR ISI

HALAMAN SAMPUL	i
HALAMAN JUDUL.....	ii
HALAMAN PERSETUJUAN.	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
PERNYATAAN KEASLIAN.....	v
PRAKATA.....	vi
ABSTRAK.....	vii
ABSTRACT.....	viii
DAFTAR ISI	ix
DAFTAR TABEL	x
DAFTAR GAMBAR	xii
DAFTAR LAMPIRAN	xiv
BAB I PENDAHULUAN.....	1
1.1 Latar Belakang	1
1.2 Rumusan Masalah.....	6
1.3 Tujuan Penelitian.....	6
1.4 Manfaat Penelitian.....	6
BAB II TINJAUAN PUSTAKA	7
2.1 Landasan Teori dan Konsep.....	7
2.1.1 Teori Ketenagakerjaan.....	7
2.1.2 Teori Pengangguran.....	8
2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi.....	13
2.1.4. Investasi.....	14

2.1.5	Pengeluaran Pemerintah.....	15
2.1.6	Teori Upah	16
2.1.7	Pertumbuhan Penduduk.....	17
2.2	Hubungan Antar Variabel	18
2.2.1	Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran.....	18
2.2.2	Investasi Terhadap Pengangguran.....	19
2.2.3	Pengeluaran Pemerintah Terhadap Pengangguran.....	20
2.2.4	Upah Terhadap Pengangguran.....	21
2.2.5	Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pengangguran.....	22
2.3	Tinjauan Empiris.....	23
2.4	Kerangka Pikir	25
2.5	Hipotesis.....	26
BAB III	METODE PENELITIAN	27
3.1	Rancangan Penelitian	27
3.2	Lokasi Penelitian	24
3.3	Jenis dan Sumber Data	27
3.4	Metode Pengumpulan Data	28
3.5	Metode Analisis Data.....	28
3.6	Uji Statistik	30
3.6.1	Uji Statistik F.....	30
3.6.2	Uji Statistik t	30
3.6	Definisi Operasional Variable.....	31
BAB IV	HASIL DAN PEMBAHASAN.....	33
4.1	Deskripsi Variabel Penelitian	
4.1.1	Keadaan Demografi di Indonesia.....	33

4.1.2 Perkembangan Pengangguran di Indonesia	34
4.1.3 Perkembangan Pertumbuhan Ekonomi di Indonesia	34
4.1.4 Perkembangan Investasi di Indonesia	35
4.1.5 Perkembangan Pengeluaran Pemerintah di Indonesia	36
4.1.6 Perkembangan Upah Minimum Provinsi di Indonesia	37
4.1.7 Perkembangan Pertumbuhan Penduduk di Indonesia	39
4.2 Hasil Analisis	40
4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik.....	40
4.2.2 Pengaruh Indikator Makroekonomi,Upah Minimum dan Demografis terhadap Pengangguran di Indonesia.....	44
4.3 Pembahasan Hasil Penelitian	
4.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia.....	46
4.3.2 Pengaruh Investasi terhadap Pengangguran di Indonesia.....	48
4.3.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pengangguran di Indonesia	49
4.3.4 Pengaruh Upah minimum provinsi terhadap Pengangguran di Indonesia	50
4.3.5 Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Pengangguran di Indonesia	51
BAB V PENUTUP	52
5.1 Kesimpulan.....	52
5.2 Saran.....	53
DAFTAR PUSTAKA.....	55
LAMPIRAN.....	59

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1 Perkembangan Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Penduduk di Indonesia tahun 2011 – 2015 Indonesia.....	2
Tabel 4.1 Output Pengujian Multikolieritas.....	41
Tabel 4.2 Pengujian Autokorelasi.....	42
Tabel 4.3 Output Pengujian Autokorelasi.....	43
Tabel 4.4 Output Pengujian Heteroskedastisitas.....	44
Tabel 4.5 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Pertumbuhan Upah Minimum Provinsi dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Pengangguran di Indonesia	45

DAFTAR GAMBAR

Gambar 2.1 Kerangka Pikir	26
---------------------------------	----

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang

Sumber daya manusia merupakan salah satu faktor produksi yang sangat penting, apalagi di negara Indonesia yang memiliki sumber daya manusia yang cukup melimpah, karena sumber daya manusia mempunyai kedudukan sebagai subjek dan objek suatu pembangunan negara. Salah satu tujuan dari pembangunan adalah mengurangi pengangguran, dengan menambah lapangan kerja bagi masyarakat agar tenaga kerja yang ada dapat terserap dengan baik.

Pengangguran merupakan salah satu fenomena makroekonomi yang dialami oleh hampir semua negara di dunia. Jika berbicara tentang masalah pengangguran, berarti tidak hanya berbicara tentang masalah sosial tetapi juga berbicara tentang masalah ekonomi, karena pengangguran selain menyebabkan masalah sosial juga memberikan pengaruh terhadap perkembangan ekonomi suatu negara khususnya negara yang sedang berkembang seperti Indonesia.

Masalah pengangguran di setiap negara di dunia adalah masalah yang sampai sekarang masih sulit untuk di atasi, karena banyak berbagai kendala yang dihadapi seperti kemampuan individu, informasi dan lain sebagainya. Jika masyarakat tidak menganggur berarti mempunyai pekerjaan dan penghasilan, dan dengan penghasilan yang dimiliki dari bekerja diharapkan dapat memenuhi kebutuhan hidup.

Terdapat berbagai macam definisi dan konsep dari pengangguran, Dalam konsep yang sederhana pengangguran adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau mereka yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi sedang mencari

pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, dan mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan (BPS).

Tabel 1.1
Perkembangan Tingkat Pengangguran, Pertumbuhan Ekonomi dan Pertumbuhan Penduduk dari tahun 2011 - 2015

Tahun	Tingkat Pengangguran (%)	Pertumbuhan Ekonomi (%)	Pertumbuhan Penduduk (%)
2011	6,60	6,44	-0,37
2012	6,13	6,19	3,32
2013	6,20	5,56	0,27
2014	5,94	5,02	1,42
2015	6,20	4,79	0,42

Sumber : Badan Pusat Statistik 2011 - 2015

Pada tabel 1.1 di atas menunjukkan tingkat pengangguran mengalami penurunan dari 6,60 persen pada tahun 2011 menjadi 6,13 persen pada tahun 2012. Namun pada tahun 2013 mengalami kenaikan menjadi 6,20 persen tahun 2014 mengalami penurunan kembali menjadi 5,94 persen dan di tahun 2015 kembali mengalami kenaikan menjadi 6,20 persen. Meskipun cenderung mengalami fluktuatif tingkat pengangguran di Indonesia terbilang masih cukup tinggi.

Negara India merupakan salah contoh negara yang cukup berhasil menurunkan tingkat pengangguran secara drastis. Data dari *tradingeconomics* menunjukkan pada tahun 2010 tingkat pengangguran negara tersebut mencapai 9,4 persen, di tahun 2011 menurun menjadi 6,3 persen, tahun 2012 sebesar 5,2 persen dan pada tahun 2013 kembali turun menjadi 4,9 persen. Meskipun memiliki jumlah populasi yang cukup tinggi diatas 1 milyar negara tersebut mampu menciptakan lapangan kerja dengan cukup baik.

Indikator ekonomi yang berpengaruh terhadap tingkat pengangguran adalah Pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi merupakan penambahan PDB, PDB adalah produk nasional berupa barang dan jasa yang dihasilkan oleh faktor-faktor produksi di dalam batas wilayah suatu negara domestik selama setahun baik milik warga negara maupun orang asing. Pertumbuhan ekonomi melalui PDB yang meningkat, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di negara tersebut, karena dengan kenaikan pendapatan nasional melalui PDB kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan PDB suatu negara dapat dikaitkan dengan tingginya jumlah pengangguran di suatu negara (Mankiw, 2000).

Pada Tabel 1.1 menunjukkan Pertumbuhan ekonomi Indonesia selama 5 tahun terakhir mengalami penurunan pada tahun 2011 sebesar 6,44 persen, di tahun 2012 menjadi 6,19 persen, tahun 2013 menjadi 5,56 persen, tahun 2014 menjadi 5,02 dan yang terakhir pada tahun 2015 turun menjadi 4,79 persen. Ini mengindikasikan bahwa produksi dalam negeri terus mengalami penurunan dan secara tidak langsung penyerapan tenaga kerja cenderung tidak meningkat

Dari sisi investasi, akan mendorong terciptanya barang modal baru sehingga akan menambah faktor produksi yang secara tidak langsung dapat menciptakan lapangan kerja atau kesempatan kerja yang akan menyerap tenaga kerja dan kemudian akan mengurangi pengangguran (Prasojo, 2009). Hal ini juga di dukung oleh pemerintah lewat UU Nomor 25 Tahun 2007 tentang Penanaman Modal yang bertujuan menciptakan lapangan kerja.

Menurut Sukirno (2006), Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi dan kegiatan – kegiatan pembangunan. Pengeluaran pemerintah yang digunakan untuk membeli

barang dan jasa akan mendorong terciptanya lapangan kerja dalam upaya menyediakan barang publik secara tidak langsung akan membuka kesempatan kerja. Lapangan kerja yang tersedia akibat dari aktivitas pemerintah akan dipengaruhi oleh jenis pengeluaran.

Selanjutnya hal yang mendasar dalam ketenagakerjaan di Indonesia terkait upah. Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin dan tunjangan dalam bentuk natural.

Menurut Gilarso (2003), upah atau balas karya tenaga kerja ada dua segi yang penting, untuk pihak produsen, upah merupakan biaya produksi yang mesti ditekan serendah mungkin. Di sisi lain, untuk pihak pekerja/buruh, upah merupakan sumber pendapatan bagi dirinya maupun keluarganya, dan dengan demikian juga menjadi sumber pembelanjaan masyarakat.

Dari sisi perusahaan menaikkan upah dilihat sebagai pertambahan biaya produksi yang penyelesaiannya para pengusaha memutuskan untuk menaikkan harga jual produk yang diproduksi untuk menjamin kelangsungan usahanya. Atau kemungkinan yang terjadi dengan melakukan pengurangan tenaga kerja yang sudah ada, maka akan lebih banyak terjadi lagi pengangguran.

Berikutnya, Pertumbuhan penduduk dapat dipandang sebagai faktor pendukung maupun penghambat bagi suatu negara. Dari sudut pandang pendukung dengan pertambahan penduduk berarti juga pertambahan tenaga kerja yang dapat meningkatkan produksi dan memperluas pasar. Sedangkan disatu pihak

pertumbuhan penduduk yang sangat pesat akan menyebabkan kelebihan tenaga kerja dan bila tidak diikuti dengan perluasan kesempatan kerja akan menimbulkan masalah pengangguran.

Menurut Syaadah (2014), Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah atau daerah merupakan modal pembangunan, karena terdapat angkatan kerja sesuai perkembangan penduduk tersebut. Sedangkan dilain pihak akan menjadi beban pemerintah karena setiap jiwa akan membutuhkan kebutuhan hidup, seperti pangan, sandang, penyediaan sarana dan prasarana serta lapangan kerja.

Pada tabel 1.1 menunjukkan Pertumbuhan Penduduk di Indonesia cenderung fluktuatif pada tahun 2011 berada di angka -0,34 persen, pada tahun 2012 mengalami kenaikan cukup tinggi menjadi 3,32 persen, tahun berikutnya 2013 mengalami penurunan menjadi 0,27 persen, Tahun 2014 kembali naik menjadi 1,42 persen, dan ditahun 2015 turun menjadi 0,42 persen.

Peran Pemerintah dalam hal ini mempunyai tugas yang cukup berat untuk mengatasi masalah pengangguran di negaranya. Peningkatan angkatan kerja baru yang lebih besar dibandingkan dengan lapangan kerja yang tersedia terus akan menyebabkan jurang (gap) yang terus menerus membesar.

Tidak hanya sampai disitu, masalah pemutusan hubungan kerja (PHK) juga menjadi masalah didalam dunia ketenagakerjaan. Diharapkan pemerintah melalui kebijakan – kebijakannya dapat menciptakan lapangan kerja yang baru dan di satu sisi tetap menjaga agar pekerja/buruh tidak di PHK dari tempat kerjanya, Sehingga terjadi keseimbangan pasar tenaga kerja.

1.2 Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas maka rumusan masalah dalam penelitian ini sebagai berikut : Seberapa Besar Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Provinsi dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran di Indonesia 2011 – 2015

1.3 Tujuan dan Kegunaan Penelitian

Berdasarkan uraian latar belakang masalah serta perumusan masalah, dapat ditetapkan tujuan dan kegunaan dari penelitian ini adalah sebagai berikut : Untuk Menganalisis Seberapa Besar Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Provinsi dan Pertumbuhan Penduduk Terhadap Pengangguran di Indonesia 2011 – 2015

1.4 Manfaat Penelitian

Manfaat yang diperoleh dari penelitian ini adalah:

1. Sebagai referensi bagi pihak – pihak seperti Dinas Tenaga Kerja dan Transmigrasi, dengan memberikan informasi tentang jumlah pengangguran di indonesia serta faktor-faktor apa saja yang mempengaruhinya.
2. Dapat memberikan sumbangan pemikiran dalam pengembangan ilmu pengetahuan.
3. Memberikan informasi kepada pemerintah tentang kebijakan yang dikeluarkan dalam penetapan upah minimum di setiap provinsi yang berdampak terhadap pengangguran.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

2.1. Tinjauan Teoritis

2.1.1. Ketenagakerjaan

Menurut Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang ketenagakerjaan, yang disebut sebagai tenaga kerja adalah setiap orang yang mampu melakukan pekerjaan guna menghasilkan barang dan atau jasa baik untuk memenuhi kebutuhan sendiri maupun masyarakat. Indonesia, Badan Pusat Statistik pada tahun sekitar 1970-an menentukan batas usia kerja bila seseorang berumur 10 tahun atau lebih. Semenjak dilaksanakan SAKERNAS (Survei Angkatan Kerja) batas usia kerja dirubah menjadi 15 tahun atau lebih, ini dilaksanakan karena dianjurkan oleh International Labour Organization (ILO).

Menurut Sumarsono (2009), dalam hubungannya dengan pasar tenaga kerja perilaku penduduk digolongkan menjadi 2, yaitu golongan aktif secara ekonomis dan tidak aktif. Angkatan kerja termasuk golongan aktif secara ekonomis. Golongan ini terdiri dari penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya dan berhasil memperolehnya (employed) dan penduduk yang menawarkan tenaga kerjanya di pasar tenaga kerja tetapi belum berhasil memperolehnya (unemployed).

Dari sisi perusahaan permintaan tenaga kerja adalah hubungan antara tingkat upah dan kuantitas tenaga kerja yang dikehendaki oleh perusahaan untuk di perkerjakan (Arfida, 2003). Suatu permintaan jumlah maksimum tenaga kerja di suatu perusahaan bersedia untuk memperkerjakannya pada setiap kemungkinan tingkat upah dalam jangka waktu tertentu.

2.1.2 Teori Pengangguran

Menurut Badan Pusat Statistik Pengangguran adalah mereka yang tidak memiliki pekerjaan atau mereka yang tergolong dalam angkatan kerja tetapi sedang mencari pekerjaan, mereka yang tak punya pekerjaan dan mempersiapkan usaha, dan mereka yang tak punya pekerjaan dan tidak mencari pekerjaan, karena merasa tidak mungkin mendapatkan pekerjaan.

Pandangan dari Teori Klasik bahwa pengangguran dapat dicegah dengan sisi penawaran dan mekanisme harga di pasar bebas yang dapat menjamin terciptanya permintaan yang menyerap semua penawaran. Jadi dalam Teori Klasik jika terjadi kelebihan penawaran tenaga kerja maka upah akan turun dan hal tersebut mengakibatkan produksi perusahaan menjadi turun. Sehingga permintaan tenaga akan terus meningkat karena perusahaan mampu melakukan perluasan produksi akibat keuntungan yang diperoleh dari rendahnya biaya tadi.

Sementara menurut Teori Keynes sesungguhnya masalah pengangguran terjadi akibat permintaan agregat yang rendah, terhambatnya pertumbuhan ekonomi bukan disebabkan oleh rendahnya produksi akan tetapi rendahnya konsumsi. Dalam hal ini tidak dapat diserahkan ke mekanisme pasar bebas. Ketika tenaga kerja meningkat, upah akan turun hal ini justru akan merugikan bukan menguntungkan, karena penurunan upah berarti menurunkan daya beli masyarakat terhadap barang-barang, akhirnya produsen akan mengalami kerugian dan tidak dapat menyerap tenaga kerja.

Pengangguran merupakan masalah dalam ekonomi karena ketika angka pengangguran meningkat, sebagai dampaknya suatu Negara membuang barang

dan jasa yang sebenarnya mampu diproduksi oleh pengangguran. masalah sosial menjadi efek selanjutnya bagi pengangguran karena mengakibatkan penderitaan yang besar untuk pekerja yang menganggur yang harus berjuang dengan pendapatan yang berkurang. Biaya ekonomi dari pengangguran jelas besar, namun tidak ada jumlah mata uang yang dapat mengungkapkan secara tepat tentang korban psikologi pada saat mereka menganggur (Samuleson, 2004).

Pengangguran adalah masalah makroekonomi yang mempengaruhi manusia secara langsung. Bagi setiap orang kehilangan pekerjaan berarti penurunan standar kehidupan. Jadi tidaklah mengejutkan jika pengangguran menjadi topik yang sangat menarik dibicarakan dalam perdebatan di setiap negara sehingga kebijakan pemerintah yang ditawarkan diharapkan akan membantu menciptakan lapangan kerja (Mankiw, 2006).

- Berdasarkan penyebabnya pengangguran dapat dibagi empat kelompok:

Pengangguran normal atau friksional : Apabila dalam suatu ekonomi terdapat pengangguran sebanyak dua atau tiga persen dari jumlah tenaga kerja maka ekonomi itu sudah dipandang sebagai mencapai kesempatan kerja penuh. Pengangguran sebanyak dua atau tiga persen tersebut dinamakan pengangguran normal atau pengangguran friksional. Para penganggur ini tidak ada pekerjaan bukan karena tidak dapat memperoleh kerja, tetapi karena sedang mencari kerja lain yang lebih baik. Dalam perekonomian yang berkembang pesat, pengangguran adalah rendah dan pekerjaan mudah diperoleh. Sebaliknya pengusaha susah memperoleh pekerja, Akibatnya pengusaha menawarkan gaji yang lebih tinggi. Hal ini akan mendorong para pekerja untuk meninggalkan pekerjaanya yang lama dan

mencari pekerjaan baru yang lebih tinggi gajinya atau lebih sesuai dengan keahliannya. Dalam proses mencari kerja baru ini untuk sementara para pekerja tersebut tergolong sebagai penganggur. Mereka inilah yang digolongkan sebagai pengangguran normal.

Pengangguran siklikal : Perekonomian tidak selalu berkembang dengan teguh. Adakalanya permintaan agregat lebih tinggi, dan ini mendorong pengusaha menaikkan produksi. Lebih banyak pekerja baru digunakan dan pengangguran berkurang. Akan tetapi pada masa lainnya permintaan agregat menurun dengan banyaknya. Misalnya, di negara-negara produsen bahan mentah pertanian, penurunan ini mungkin disebabkan kemerosotan harga-harga komoditas. Kemunduran ini menimbulkan efek kepada perusahaan-perusahaan lain yang berhubungan, yang juga akan mengalami kemerosotan dalam permintaan terhadap produksinya. Kemerosotan permintaan agregat ini mengakibatkan perusahaan-perusahaan mengurangi pekerja atau menutup perusahaannya, sehingga pengangguran akan bertambah. Pengangguran dengan wujud tersebut dinamakan pengangguran siklikal.

Pengangguran struktural : Tidak semua industri dan perusahaan dalam perekonomian akan terus berkembang maju, sebagiannya akan mengalami kemunduran. Kemerosotan ini ditimbulkan oleh salah satu atau beberapa faktor berikut: wujudnya barang baru yang lebih baik, kemajuan teknologi mengurangi permintaan ke atas barang tersebut, biaya pengeluaran sudah sangat tinggi dan tidak mampu bersaing, dan ekspor produksi industri itu sangat menurun oleh karena persaingan yang lebih serius dari Negara-negara lain. Kemerosotan itu akan menyebabkan kegiatan produksi dalam industry tersebut menurun, dan sebagian

pekerja terpaksa diberhentikan dan menjadi penganggur. Pengangguran yang wujud digolongkan sebagai pengangguran struktural. Dinamakan demikian karena disebabkan oleh perubahan struktur kegiatan ekonomi.

Pengangguran teknologi : Pengangguran dapat pula ditimbulkan oleh adanya penggantian tenaga manusia oleh mesin-mesin dan bahan kimia. Racun lalang dan rumput, misalnya telah mengurangi penggunaan tenaga kerja untuk membersihkan perkebunan, sawah dan lahan pertanian lain. Begitu juga mesin telah mengurangi kebutuhan tenaga kerja untuk membuat lubang, memotong rumput, membersihkan kawasan, dan memungut hasil. Sedangkan di pabrik-pabrik, ada kalanya robot telah menggantikan kerja-kerja manusia. Pengangguran yang ditimbulkan oleh penggunaan mesin dan kemajuan teknologi lainnya dinamakan pengangguran teknologi.

- Berdasarkan cirinya, Pengangguran dibagi ke dalam empat kelompok :

Pengangguran terbuka tercipta sebagai akibat pertambahan lowongan pekerjaan yang lebih rendah dari pertambahan tenaga kerja. Sebagai akibatnya dalam perekonomian semakin banyak jumlah tenaga kerja yang tidak dapat memperoleh pekerjaan. Efek dari keadaan ini di dalam suatu jangka masa yang cukup panjang mereka tidak melakukan suatu pekerjaan. Jadi mereka menganggur secara nyata dan separuh waktu, dan oleh karenanya dinamakan pengangguran terbuka. Pengangguran terbuka dapat pula wujud sebagai akibat dari kegiatan ekonomi yang menurun, dari kemajuan teknologi yang mengurangi penggunaan tenaga kerja, atau sebagai akibat dari kemunduran perkembangan sesuatu industri.

Pengangguran tersembunyi pengangguran ini terutama wujud di sektor pertanian atau jasa. Setiap kegiatan ekonomi memerlukan tenaga kerja, dan jumlah tenaga kerja yang digunakan tergantung pada banyak faktor, faktor yang perlu dipertimbangkan adalah besar kecilnya perusahaan, jenis kegiatan perusahaan, mesin yang digunakan (apakah intensif buruh atau intensif modal) dan tingkat produksi yang dicapai. Di banyak negara berkembang seringkali didapati bahwa jumlah pekerja dalam suatu kegiatan ekonomi adalah lebih banyak dari yang sebenarnya diperlukan supaya ia dapat menjalankan kegiatannya dengan efisien. Kelebihan tenaga kerja yang digunakan digolongkan dalam pengangguran tersembunyi. Contoh-contohnya ialah pelayan restoran yang lebih banyak dari yang diperlukan dan keluarga petani dengan anggota keluarga yang besar yang mengerjakan luas tanah yang sangat kecil.

Pengangguran bermusim, pengangguran ini terutama terdapat di sektor pertanian dan perikanan. Pada musim hujan penyadap karet dan nelayan tidak dapat melakukan pekerjaan mereka dan terpaksa menganggur. Pada musim kemarau pula para petani tidak dapat mengerjakan tanahnya. Di samping itu pada umumnya para petani tidak begitu aktif di antara waktu sesudah menanam dan sesudah menuai. Apabila dalam masa tersebut para penyadap karet, nelayan dan petani tidak melakukan pekerjaan lain maka mereka terpaksa menganggur. Pengangguran seperti ini digolongkan sebagai pengangguran bermusim.

Setengah menganggur, pada negara-negara berkembang penghijrahan atau migrasi dari desa ke kota adalah sangat pesat. Sebagai akibatnya tidak semua orang yang pindah ke kota dapat memperoleh pekerjaan dengan mudah. Sebagiannya terpaksa menjadi penganggur sepenuh waktu. Di samping itu ada pula

yang tidak menganggur, tetapi tidak pula bekerja sepenuh waktu, dan jam kerja mereka adalah jauh lebih rendah dari yang normal. Mereka mungkin hanya bekerja satu hingga dua hari seminggu, atau satu hingga empat jam sehari. Pekerja-pekerja yang mempunyai masa kerja seperti yang dijelaskan ini digolongkan sebagai setengah menganggur (*underemployed*). Dan jenis penganggurannya dinamakan *underemployment*.

2.1.3 Teori Pertumbuhan Ekonomi

Menurut pandangan ekonomi klasik ada empat faktor yang mempengaruhi pertumbuhan ekonomi, yaitu : jumlah penduduk, jumlah stok barang modal, luas tanah dan kekayaan alam, serta tingkat teknologi yang digunakan. Walaupun menyadari bahwa pertumbuhan ekonomi tergantung kepada banyak faktor, namun ekonomi klasik lebih menitikberatkan perhatiannya kepada pengaruh penambahan penduduk kepada pertumbuhan ekonomi.

Apabila penduduk sedikit dan kekayaan alam relatif berlebihan, tingkat pengembalian modal dari investasi yang dibuat adalah tinggi, para pengusaha akan mendapatkan keuntungan yang besar. Hal ini akan menimbulkan investasi baru, dan pertumbuhan ekonomi terwujud. Keadaan seperti itu tidak akan terus-menerus berlangsung. Jika penduduk sudah mencapai titik optimum, pertambahannya akan menurunkan tingkat kegiatan ekonomi karena produktivitas setiap penduduk telah menjadi negatif, ini mengakibatkan kemakmuran masyarakat menurun kembali.

Dari berbagai teori pertumbuhan yang ada yakni teori Harold Domar, Neoklasikal dari Solow, dan teori pertumbuhan baru atau teori Endogen oleh Romer maka dapat diambil kesimpulan bahwa terdapat tiga faktor utama dalam

pertumbuhan ekonomi, yakni: akumulasi modal yang meliputi semua bentuk atau jenis investasi baru, pertumbuhan penduduk dan kemajuan teknologi.

Pertumbuhan ekonomi adalah sebagian dari perkembangan kesejahteraan masyarakat yang diukur dengan besarnya pertumbuhan produk domestik bruto (PDB). Konsep PDB digunakan pada tingkat nasional, sedangkan untuk tingkat provinsi dan kabupaten/kota digunakan konsep konsep PDRB. PDB atau PDRB dapat diukur dengan 3 macam pendekatan, yaitu pendekatan produksi, pendekatan pendapatan dan pendekatan pengeluaran (Tambunan, 2003).

Suatu perekonomian dikatakan tumbuh jika terjadi kenaikan output per kapita dalam jangka panjang, pertumbuhan ekonomi sebagai suatu ukuran kuantitatif yang menggambarkan perkembangan suatu perekonomian dalam satu tahun tertentu apabila dibandingkan dengan tahun sebelumnya (Sukirno, 2006).

2.1.4 Investasi

Menurut Sumanto (2006), investasi merupakan sejumlah dana suatu periode untuk mendapatkan pendapatan yang diharapkan di masa yang akan datang sebagai kompensasi unit yang diinvestasikan. Sedangkan menurut Anoraga dan Pakarti (2006) mendefinisikan investasi sebagai penggunaan uang dengan maksud memperoleh penghasilan yang lebih banyak di masa depan. Investasi biasanya berupa penanaman modal di dalam perusahaan, dengan tujuan agar kekayaan suatu korporasi atau perusahaan bertambah.

Menurut Samuelson (2004), investasi meliputi penambahan stok modal atau barang di suatu negara, seperti bangunan peralatan produksi, dan barang-barang inventaris dalam waktu satu tahun. Pengeluaran investasi lebih tidak stabil apabila dibandingkan dengan pengeluaran konsumsi sehingga fluktuasi investasi dapat

menyebabkan resesi, Adakalanya penanaman modal dilakukan untuk menggantikan barang-barang modal yang lama dan perlu pembaruan (Sukirno, 2006).

Kapasitas produksi yang semakin tinggi pasti membutuhkan tenaga kerja baru. Investasi merupakan alat untuk mempercepat pertumbuhan tingkat produksi di suatu negara yang khususnya sedang berkembang, dengan demikian investasi berperan sebagai sarana untuk menciptakan kesempatan kerja (Sukirno, 2006)

2.1.5 Teori Pengeluaran Pemerintah

Menurut Suparmoko (2002) pengeluaran pemerintah dapat bersifat lengkap yaitu pembelian barang dan jasa dalam perekonomian yang dapat langsung dikonsumsi maupun dapat pula untuk menghasilkan barang lainnya. Disamping itu, pengeluaran pemerintah dapat pula bersifat transfer saja, yaitu berupa pemindahan uang kepada individu-individu untuk kepentingan sosial, kepada perusahaan-perusahaan sebagai subsidi.

Oleh karena itu, dalam mengatur pengeluarannya, pemerintah harus mempertimbangkan berbagai pertimbangan, sehingga keputusan yang diambil mengenai pengeluarannya dapat dilaksanakan tepat sasaran, baik yang akan menikmati ataupun pihak lain yang terkena kebijakan tersebut.

Pengeluaran pemerintah (*government expenditure*) adalah bagian dari kebijakan fiskal yakni suatu tindakan pemerintah untuk mengatur jalannya perekonomian dengan cara menentukan besarnya penerimaan dan pengeluaran pemerintah tiap tahunnya yang tercermin dalam dokumen APBN untuk nasional dan APBD untuk daerah/regional. Menurut Bastian (2006), Anggaran Pendapatan dan

Belanja Daerah merupakan rencana kerja Pemerintah dalam bentuk satuan uang untuk kurun waktu satu tahun yang berorientasi pada tujuan kesejahteraan publik.

Menurut Mardiasmo (2005), Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah sebagai instrumen kebijakan, anggaran daerah menduduki posisi sentral dalam upaya pengembangan kapabilitas dan efektivitas. Anggaran daerah digunakan sebagai alat untuk menentukan besar pendapatan dan pengeluaran, membantu pengambilan keputusan dan perencanaan pembangunan.

Memperbesar pengeluaran dengan tujuan semata-mata untuk meningkatkan pendapatan nasional atau memperluas kesempatan kerja adalah hal yang tidak memadai melainkan harus memperhitungkan masyarakat lapisan mana yang bekerja atau meningkat pendapatannya. Pemerintah pun perlu menghindari agar peningkatan perannya dalam perekonomian justru melemahkan kegiatan pihak swasta (Dumairy, 1996).

2.1.6 Teori upah

Upah adalah pendapatan yang diterima tenaga kerja dalam bentuk uang, yang mencakup bukan hanya komponen upah/gaji, tetapi juga lembur dan tunjangan-tunjangan yang diterima secara rutin/reguler (tunjangan transport, uang makan dan tunjangan lainnya sejauh diterima dalam bentuk uang), tidak termasuk Tunjangan Hari Raya (THR), tunjangan bersifat tahunan, kwartalan, tunjangan-tunjangan lain yang bersifat tidak rutin dan tunjangan dalam bentuk natural.

Menurut Gilarso (2003) balas karya untuk faktor produksi tenaga kerja manusia disebut upah (dalam arti luas, termasuk gaji, honorarium, uang lembur, tunjangan, dsb). Upah biasanya dibedakan menjadi dua, yaitu: upah nominal

(sejumlah uang yang diterima) dan upah riil (jumlah barang dan jasa yang dapat dibeli dengan upah uang itu).

Kebutuhan hidup layak (KHL) yang menjadi dasar penetapan upah adalah standar kebutuhan seorang pekerja/buruh lajang untuk dapat hidup layak secara fisik untuk kebutuhan 1 bulan. KHL terdiri dari komponen dan jenis kebutuhan pokok hidup yang tercantum dalam Lampiran Peraturan Menakertrans RI Nomor 13 Tahun 2012 yang terdiri dari 60 komponen, yang meliputi makanan dan minuman, sandang, perumahan, pendidikan, kesehatan, transportasi, rekreasi dan tabungan.

Menurut Simanjuntak (1996) setiap kenaikan tingkat upah akan diikuti oleh turunnya penawaran terhadap tenaga kerja, yang berarti akan menyebabkan bertambahnya pengangguran. Demikian pula sebaliknya dengan turunnya tingkat upah maka akan diikuti oleh meningkatnya kesempatan kerja. Semakin tinggi tingkat upah yang ditetapkan, maka berpengaruh pada meningkatnya biaya produksi, akibatnya untuk melakukan efisiensi, perusahaan terpaksa melakukan pengurangan tenaga kerja.

2.1.7 Teori Pertumbuhan Penduduk

Pertumbuhan penduduk adalah merupakan keseimbangan yang dinamis antara kekuatan-kekuatan yang menambah dan mengurangi jumlah penduduk. Pertumbuhan penduduk diakibatkan oleh beberapa komponen yaitu: kelahiran (fertilitas), kematian (mortalitas), migrasi masuk dan migrasi keluar.

Pertumbuhan penduduk sangat erat kaitannya dengan kenaikan jumlah angkatan kerja secara tradisional dianggap sebagai faktor yang positif dalam merangsang pertumbuhan ekonomi. Hal tersebut berarti semakin banyak jumlah

angkatan kerja berarti semakin banyak pasokan tenaga kerja, dan semakin banyak jumlah penduduk akan meningkat potensi pasar domestik (Arsyad, 2010).

Menurut Syaadah (2014), Pertumbuhan penduduk di suatu wilayah atau daerah merupakan modal pembangunan, karena terdapat angkatan kerja sesuai perkembangan penduduk tersebut. Sedangkan dilain pihak akan menjadi beban pemerintah karena setiap jiwa akan membutuhkan kebutuhan hidup, seperti pangan, sandang, penyediaan sarana dan prasarana serta lapangan kerja.

2.2 Hubungan Antar Variabel

2.2.1 Hubungan Pertumbuhan Ekonomi Terhadap Pengangguran

Terdapat beberapa teori yang menjelaskan keterkaitan hubungan antara pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran. Pertumbuhan ekonomi melalui PDB yang meningkat, diharapkan dapat menyerap tenaga kerja di negara tersebut, karena dengan kenaikan pendapatan nasional melalui PDB kemungkinan dapat meningkatkan kapasitas produksi. Hal ini mengindikasikan bahwa penurunan PDB suatu negara dapat dikaitkan dengan tingginya jumlah pengangguran di suatu negara (Mankiw, 2000).

Sementara menurut Ningsih (2010) dalam penelitiannya pertumbuhan ekonomi mempunyai dampak yang signifikan terhadap pengangguran. Dikatakan bahwa pada saat pertumbuhan ekonomi dengan laju positif, maka pendapatan dari masyarakat suatu negara bisa dipastikan meningkat di karenakan banyaknya lapangan pekerjaan.

Akan tetapi, dikarenakan pengangguran yang dimaksud pengangguran terbuka, maka setiap kenaikan pada pertumbuhan ekonomi menyebabkan laju yang searah, yaitu meningkatnya nilai dari pengangguran. Hal ini dikarenakan naiknya pertumbuhan ekonomi lebih dipengaruhi industri padat modal yang banyak menggunakan teknologi. Ini menyebabkan kurangnya penyerapan tenaga kerja karena lebih mengandalkan pada tenaga mesin atau teknologi.

Dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi suatu negara maka output yang dihasilkan menjadi lebih banyak dari tahun sebelumnya, dengan demikian perusahaan akan membutuhkan lebih banyak pekerja ketika produksi meningkat sehingga kesempatan kerja meningkat dan pengangguran akan mengalami penurunan (Qomariyah, 2014).

Penelitian yang dilakukan Darman (2013), menunjukkan bahwa tingkat pengangguran di Indonesia tidak responsif terhadap perubahan dalam output real melalui hukum okun, dengan alasan pada negara berkembang *labor* intensif masih dominan ketimbang *labor skill*. Hubungan antara variabel pertumbuhan output real dan tingkat pengangguran tidak terbukti saling mempengaruhi.

2.2.2 Hubungan Investasi dengan Pengangguran

Hubungan antara investasi (PMA dan PMDN) dengan kesempatan kerja menurut (Mulyadi, 2003), investasi tidak hanya menciptakan permintaan, tetapi juga memperbesar kapasitas produksi. Tenaga kerja yang merupakan salah satu faktor produksi, otomatis akan ditingkatkan penggunaannya.

Hasil dari penelitian Rahmawati (2012) menunjukkan bahwa investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel kesempatan kerja. Hal ini

menjelaskan bahwa tingginya investasi tidak serta merta dapat menaikkan kesempatan kerja dan menunjukkan bahwa investasi bukan indikator penting untuk menaikkan kesempatan kerja.

Investasi memainkan peran penting dalam menggerakkan ekonomi karena dengan pembentukan modal dapat membentuk kapasitas produksi maupun menciptakan lapangan kerja baru sehingga dapat memperluas kesempatan kerja. Dengan adanya pembentukan lapangan pekerjaan baru secara tidak langsung investasi mengurangi jumlah pengangguran (Tirta, 2013).

Hal di atas juga didukung oleh penelitian Kurniawan (2014), yang menyatakan bahwa bila permintaan terhadap barang dan jasa lesu, maka pada gilirannya timbul pula kelesuan pada permintaan tenaga kerja. Itu berarti tingkat pengangguran tidak akan mengalami penurunan.

2.2.3 Hubungan Pengeluaran Pemerintah dengan Pengangguran

Menurut Sukirno (2006), Pengeluaran pemerintah adalah konsumsi barang dan jasa yang dilakukan pemerintah untuk keperluan administrasi dan kegiatan – kegiatan pembangunan. Pemerintah dalam upaya menyediakan barang publik secara tidak langsung akan membuka kesempatan kerja. Lapangan kerja yang tersedia akibat dari aktivitas pemerintah akan dipengaruhi oleh jenis pengeluaran. Misalnya, proyek-proyek pemerintah yang membutuhkan padat karya akan lebih membutuhkan banyak tenaga kerja pada masyarakat.

Pada penelitian Ferdinan (2011) pengeluaran pemerintah berpengaruh secara signifikan terhadap penyerapan tenaga kerja. Pengeluaran Pemerintah dapat memperbesar output yang dihasilkan oleh suatu sektor ekonomi. Selain itu, juga

dapat menaikkan pendapatan masyarakat karena pengeluaran pemerintah akan menjadi penerimaan masyarakat sehingga mendorong permintaan agregat.

Dengan naiknya permintaan agregat akan mendorong produsen untuk meningkatkan output produksinya, salah satunya tenaga kerja. Dengan demikian kenaikan pengeluaran pemerintah akan menambah kesempatan kerja, proyek – proyek yang dibiayai pemerintah seperti membangun jalan, sekolah dan fasilitas umum yang lainnya bersifat padat karya dapat menaikkan penyerapan tenaga kerja sehingga mengurangi pengangguran.

Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran, Hal ini dikarenakan peningkatan dalam pengeluaran pemerintah dan penurunan dalam hal pajak, maka suatu suntikan ke dalam pendapatan nasional akan menaikkan permintaan agregat dan melalui efek pengganda akan menciptakan lapangan kerja dan mengurangi tingkat pengangguran (Muslim, 2014).

Menurut penelitian Zulhanafi dkk (2013), pengeluaran pemerintah mempengaruhi tingkat pengangguran secara signifikan. Apabila pengeluaran pemerintah meningkat seperti belanja modal untuk meningkatkan infrastruktur, maka akan berdampak pada peningkatan produksi sehingga meningkatkan permintaan terhadap faktor – faktor produksi salah satunya tenaga kerja.

2.2.4 Hubungan Upah dengan Pengangguran

Menurut Gilarso (2003), upah atau balas karya tenaga kerja ada dua segi yang penting, untuk pihak produsen, upah merupakan biaya produksi yang mesti ditekan serendah mungkin. Di sisi lain, untuk pihak pekerja/buruh, upah merupakan

sumber pendapatan bagi dirinya maupun keluarganya, dan dengan demikian juga menjadi sumber pembelanjaan masyarakat.

Hasil penelitian dari Panjawa dan Soebagiyo (2014), Upah memiliki pengaruh positif terhadap tingkat pengangguran. Penyebab terjadinya pengangguran akibat kekauan upah yaitu ketidakmampuan upah dalam melakukan penyesuaian, dimana penawaran tenaga kerja sama dengan permintaan tenaga kerja.

Berbeda dengan hasil yang di atas, Hasil penelitian Rizki (2014) menyatakan bahwa upah memiliki hubungan yang negatif yang artinya setiap kenaikan upah akan menyebabkan penurunan tingkat pengangguran. Hal ini disebabkan karena setelah terdapat kenaikan upah yang meningkat tiap tahunnya menyebabkan permintaan tenaga kerja di sektor formal lebih sedikit sehingga masyarakat memilih untuk berpindah informal, dengan berpindahnya tenaga kerja ke sektor informal masyarakat akan tetap mendapatkan pekerjaan dan masyarakat tetap tidak kehilangan pekerjaan.

Berdasarkan hasil penelitian Kristiyana (2011), semakin tinggi upah maka menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran terbuka, dikarenakan semakin tinggi upah yang harus dibayar pengusaha justru akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang dimiliki sehingga menyebabkan jumlah pengangguran bertambah.

2.2.5 Hubungan Pertumbuhan Penduduk dengan Pengangguran

Pertumbuhan penduduk usia produktif akan mengakibatkan penambahan jumlah angkatan kerja. Akan tetapi, penambahan jumlah angkatan kerja tersebut, jika tidak dibarengi dengan meningkatnya kesempatan kerja, akibatnya angkatan kerja yang jumlahnya bertambah tersebut, tidak dapat didistribusikan ke

lapangan pekerjaan. Hal ini akan berdampak pada jumlah pengangguran yang terus bertambah.

Menurut penelitian Clta (2016), Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap tingkat pengangguran. Hal ini dikarenakan kenaikan pertumbuhan penduduk tidak dibarengi dengan lapangan kerja yang bertambah, sehingga tenaga kerja yang terus bertambah tidak terserap dengan baik.

Hasil penelitian Panjawa (2014), menyatakan Pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Ketiadaan sumber pendukung, semakin lambat perkembangan lapangan kerja akan menyebabkan pengangguran semakin meningkat.

Menurut Rizki (2014) dalam penelitiannya, Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Pengangguran bersifat negatif. Maksud dari pengaruh negatif apabila pertumbuhan penduduk meningkat maka pengangguran akan berkurang, kenaikan jumlah penduduk usia produktif yang diikuti dengan kemampuan untuk melakukan atau bahkan menciptakan lapangan pekerjaan yang baru.

2.3 Tinjauan Empiris

Untuk menunjang analisis dan landasan teori yang ada, maka diperlukan penelitian terdahulu sebagai pendukung bagi penelitian ini. Berkaitan dengan faktor-faktor yang mempengaruhi Pengangguran adalah sebagai berikut:

Hasil penelitian Alghofari (2010), menunjukkan bahwa jumlah penduduk, besaran upah, dan pertumbuhan ekonomi memiliki kecenderungan hubungan positif dan kuat terhadap jumlah pengangguran.

Zulhanafi, dkk (2013), peningkatan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, investasi, pengeluaran pemerintah serta penurunan upah akan menyebabkan terjadinya penurunan tingkat pengangguran. Begitu sebaliknya, penurunan produktivitas, pertumbuhan ekonomi, investasi, pengeluaran pemerintah serta peningkatan upah akan mengakibatkan terjadinya peningkatan tingkat pengangguran.

Sulistiawati (2012), menyatakan Upah berpengaruh kuat dan mempunyai hubungan yang negatif terhadap penyerapan tenaga kerja. Koefisien jalur yang bertanda negatif bermakna bahwa pengaruh upah terhadap penyerapan tenaga kerja adalah tidak searah, artinya apabila terjadi kenaikan upah, maka berpotensi untuk menurunkan penyerapan tenaga kerja, terutama tenaga kerja yang produktivitasnya rendah.

Mnurut Rachim (2013), Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta, negatif dan signifikan terhadap Pengangguran Terbuka dan Jumlah Penduduk berpengaruh tidak signifikan terhadap Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan. Sedangkan Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengangguran Terbuka di Sulawesi Selatan.

Riswandi (2011), hasil penelitian menunjukkan bahwa variabel pertumbuhan ekonomi dan upah minimum memiliki pengaruh yang positif dan signifikan terhadap pengangguran di Sumatera Barat. Sedangkan variabel lain seperti pertumbuhan penduduk dan Investasi Swasta memiliki pengaruh yang tidak signifikan terhadap pengangguran di Sumatera Barat.

2.4 Kerangka Pikir

Pertumbuhan ekonomi melalui penambahan GDP akan berpengaruh terhadap jumlah pengangguran, Setiap adanya peningkatan terhadap persentase pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan yang berorientasi pada padat karya, akan memberikan peluang dan kesempatan kerja yang lebih besar terhadap pekerja, sehingga jumlah pengangguran pun dapat dikurangi.

Peningkatan output cenderung didorong oleh investasi serta kebijakan fiskal yang ekspansif melalui peningkatan pengeluaran pemerintah. Dengan demikian akan mendorong naiknya perluasan kesempatan kerja. Artinya melalui investasi atau pengeluaran pemerintah, akan menaikkan penciptaan output, yang nantinya akan memperluas kesempatan kerja sehingga mengurangi pengangguran.

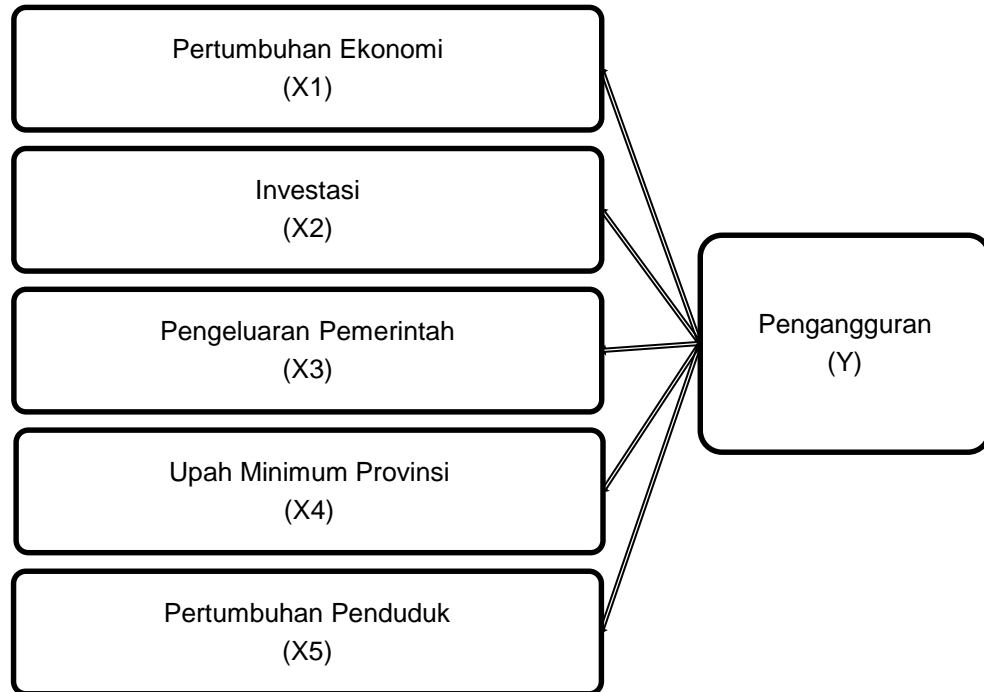
Besaran upah memiliki hubungan terhadap jumlah pengangguran. Jika upah meningkat dan biaya yang dikeluarkan cukup tinggi, maka akan mengurangi efisiensi pengeluaran, sehingga pengusaha akan mengambil kebijakan pengurangan tenaga kerja guna mengurangi biaya produksi. Hal ini akan berakibat peningkatan pengangguran.

Kenaikan jumlah penduduk yang terjadi di mengakibatkan lonjakan angkatan kerja. Akan tetapi dengan sempitnya lahan pekerjaan ini, para angkatan kerja tersebut tidak akan terserap sepenuhnya, bahkan tidak terserap dalam jumlah banyak. Akibatnya pengangguran pun meningkat. Hal ini sejalan dengan pendapat kaum klasik, yang menyatakan bahwa penduduk yang semakin bertambah jumlahnya akan mengakibatkan penurunan pada pendapatan nasional, hal ini akan

berdampak secara tidak langsung terhadap kenaikan jumlah pengangguran di suatu wilayah.

Kerangka konsepstual tersebut dapat dilihat dalam Gambar berikut:

Gambar 2.1 Kerangka Konseptual



2.5 Hipotesis

Berdasarkan kerangka konseptual dan uraian teoritis tersebut, maka penulis mengajukan hipotesis sebagai berikut:

1. Pertumbuhan Ekonomi, Investasi dan Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan terhadap Pengangguran di Indonesia.
2. Upah Minimum Provinsi dan Pertumbuhan Penduduk berpengaruh positif terhadap Pengangguran di Indonesia.

BAB III

METODE PENELITIAN

3.1. Rancangan Penelitian

Rancangan penelitian merupakan segala sesuatu yang mencakup tentang pendekatan yang digunakan dalam penelitian. Dalam penelitian ini menggunakan pendekatan kuantitatif. Yang dimana pendekatan ini menggunakan sumber data dari media tercetak dari beberapa instansi.

3.2. Lokasi Penelitian

Penelitian ini dilakukan di Indonesia, pemilihan tempat ini dengan pertimbangan Indonesia termasuk salah satu negara yang memiliki tingkat Pengangguran cukup tinggi.

3.3. Jenis dan Sumber Data

Data yang dipakai atau digunakan dalam penelitian ini adalah data sekunder, dalam bentuk data panel (pooled data) yang menggabungkan data time series periode tahun 2011 - 2015 dan data cross section 33 Provinsi Indonesia. Data sekunder adalah data yang diperoleh lewat pihak lain, tidak langsung diperoleh dari peneliti dari subjek penelitiannya. Data sekunder biasanya berwujud data dokumentasi atau data laporan yang telah tersedia. Data yang dipergunakan meliputi: data Pengangguran, data Pertumbuhan Ekonomi, data Investasi (PMA dan PMDN), data Pengeluaran Pemerintah, data Upah Minimum Provinsi, dan data Pertumbuhan Penduduk Usia Produktif. Data-data ini diperoleh dari dinas terkait, Badan Pusat Statistik (BPS) Sulawesi Selatan.

3.4. Metode Pengumpulan Data

Metode pengumpulan data yang digunakan dalam penelitian ini yakni metode pengumpulan data sekunder adalah dengan studi pustaka dari berbagai literatur atau buku-buku yang berkaitan dengan permasalahan ini dan berbagai sumber lain yang berasal dari instansi-instansi terkait.

3.5. Metode Analisis Data

Metode Analisis Data Untuk mengetahui pengaruh Pertumbuhan Ekonomi (X1), Investasi (X2), Pengeluaran Pemerintah (X3), Upah Minimum Provinsi (X4) dan Pertumbuhan Penduduk (X5) dengan variabel terikat yaitu Pengangguran (Y) di Indonesia, digunakan metode regresi berganda. Metode regresi berganda adalah metode regresi yang melibatkan satu variabel respon dengan beberapa variabel bebas. Sedangkan pengolahan data-data dari persamaan regresi dapat diketahui dengan metode Ordinary Least Square (metode kuadrat kecil). Metode ini bertujuan untuk menguji hipotesis tentang adanya hubungan sebab akibat antara berbagai variabel yang diteliti berdasarkan data-data yang diperoleh guna mendapatkan makna dan implikasi permasalahan yang ingin dipecahkan secara sistematis, aktual dan akurat.

Metode untuk menganalisis regresi berganda dalam penelitian ini menggunakan metode analisis data panel (*pooled data*) dengan program *software Microsoft Excel 2010* dan *E-views*. Menurut Gujarati (1978), data panel (*pooled data*) atau yang disebut juga data longitudinal merupakan gabungan antara data *cross section* dan data *time series*. Data *cross section* adalah data yang dikumpulkan dalam satu waktu terhadap banyak individu sedangkan data *time series* merupakan data yang dikumpulkan dari waktu ke waktu terhadap suatu individu. Metode data panel merupakan suatu metode yang digunakan untuk melakukan

analisis empirik yang tidak mungkin dilakukan jika hanya menggunakan data *time series* atau *cross section*.

Estimasi model yang menggunakan data panel dapat dilakukan dengan tiga metode, yaitu metode kuadrat terkecil (*pooled least square*), metode efek tetap (*fixed effect*) dan metode efek random (*random effect*). Untuk menentukan salah satu model estimasi data panel dari ketiga model tersebut, maka di gunakan uji *Chow Test* dan uji *Haussman Test*. uji *Chow Test* merupakan pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *Pooled Least Square* atau *Fixed Effect*. Sedangkan uji *Haussman Test* merupakan pengujian untuk memilih apakah model yang digunakan *Fixed Effect* atau *Random Effect*.

Penelitian dengan menggunakan data panel dengan cross section provinsi di Indonesia dan time series tahun 2011 - 2015, adapun model adalah sebagai berikut:

Persamaan (3.1) Model dengan data *cross section*

$$Y_i = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \varepsilon_i ; i \dots\dots\dots (3.1)$$

Persamaan (3.2) Model dengan data *time series*

$$Y_t = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \varepsilon_t ; t \dots\dots\dots (3.2)$$

Persamaan (3.3) kemudian ditulis dalam bentuk persamaan fungsional sebagai berikut:

$$Y = \alpha + \beta_1 X_{1it} + \beta_2 X_{2it} + \beta_3 X_{3it} + \beta_4 X_{4it} + \beta_5 X_{5it} + \varepsilon_{it} \dots\dots\dots (3.3)$$

Keterangan:

Y : Tingkat Pengangguran (Persen)

X1 : Pertumbuhan Ekonomi (Persen)

X2 : Investasi (Rupiah)

X3 : Pengeluaran Pemerintah (Rupiah)

X4 : Upah Minimum Provinsi (Rupiah)

X5 : Pertumbuhan Penduduk Usia Produktif (Persen)

β_0 = Intercept/konstanta

β_1 = Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran

β_2 = Pengaruh Investasi terhadap Pengangguran

β_3 = Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pengangguran

β_4 = Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran

β_5 = Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Pengangguran

μ = error term

3.6 Uji Statistik

3.6.1 Uji F Statistika

Uji F digunakan untuk melihat kevalidasian model regresi yang digunakan.

Dimana nilai F ratio dari koefisien regresi kemudian dibandingkan dengan nilai F tabel. Dengan kriteria uji,

jika $F_{hitung} > F_{tabel}$ maka H_0 di tolak

jika $F_{hitung} < F_{tabel}$ maka H_0 di terima

3.6.2 Uji t Statistika

Pengujian terhadap koefisien regresi secara parsial dilakukan dengan uji t. Pengujian ini dilakukan untuk mengetahui signifikansi peran secara parsial antara variabel independen terhadap variabel dependen dengan mengasumsikan bahwa variabel independen lain dianggap konstan. Dengan tingkat signifikansi sebesar 10% ($\alpha = 0,1$), nilai t hitung dari masing-masing koefisien regresi kemudian dibandingkan dengan nilai t tabel. Jika $t_{hitung} > t_{tabel}$ dengan prob sig $\alpha = 10\%$ ($\alpha = 0,1$) berarti

bahwa masing-masing variabel independen berpengaruh secara signifikan terhadap variabel dependen.

3.7 Definisi Operasional

1. Tingkat Pengangguran Terbuka (Y) merupakan presentase penduduk dalam angkatan kerja yang tidak memiliki pekerjaan dan sedang mencari pekerjaan setiap Provinsi di Indonesia tahun 2011 – 2015. Dan dinyatakan dalam satuan persen.
2. Pertumbuhan Ekonomi (X1) merupakan perubahan kapasitas produksi yang diwujudkan dalam bentuk kenaikan pendapatan nasional dalam unit waktu tertentu yang di ukur dengan memperhatikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto (PDRB) dari tahun ke tahun berdasarkan harga konstan 2010 Periode 2011 – 2015. Dan dinyatakan dalam satuan persen..
3. Investasi (X2) merupakan pengeluaran-pengeluaran untuk membeli barang-barang modal dan peralatan-peralatan produksi dalam hal ini dibiayai melalui investasi baik dari PMA dan PMDN Periode 2011 - 2015. Dan dinyatakan dalam satuan rupiah
4. Pengeluaran Pemerintah (X3) merupakan biaya yang harus dikeluarkan oleh pemerintah untuk melaksanakan kebijakannya. Yang dimaksud pengeluaran pemerintah dalam penelitian ini adalah besarnya realisasi pengeluaran belanja modal yang di danai dan tercantum dalam APBD Periode 2011 – 2015. Dan dinyatakan dalam satuan nilai rupiah.
5. Upah Minimum Provinsi (UMP) (X4) adalah balas jasa berupa uang atau balas jasa lain yang diberikan lembaga atau organisasi perusahaan kepada pekerjanya. UMP merupakan tingkat upah terendah bagi kabupaten/kota

yang berada diwilayah provinsi yang bersangkutan,diukur menggunakan upah minimum per bulan provinsi Periode 2011 – 2015. Dan dinyatakan dalam satuan rupiah.

6. Pertumbuhan Penduduk (X5) adalah perubahan jumlah penduduk berusia produktif yang mendiami suatu wilayah, dimana jumlah penduduk yang dimaksud dalam penelitian ini adalah jumlah penduduk usia kerja 15 - 64 tahun periode 2011 - 2015. Dan dinyatakan dalam satuan persen.

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

4.1 Deskripsi Variabel Penelitian

4.1.1 Keadaan Demografi di Indonesia

Indonesia berdasarkan sensus penduduk tahun 2010 memiliki jumlah penduduk sebesar 237.641.326 juta jiwa, menjadikan negara ini negara dengan penduduk terbanyak ke-4 di dunia. Jumlah ini diperkirakan akan terus bertambah sehingga diproyeksikan pada tahun 2015 penduduk Indonesia berjumlah 255 juta jiwa hingga mencapai 305 juta jiwa pada tahun 2035. Pulau Jawa merupakan salah satu daerah terpadat di dunia, dengan lebih dari 107 juta jiwa tinggal di daerah dengan luas sebesar New York.

Jumlah penduduk sebanyak 237 641 326 jiwa, mencakup mereka yang bertempat tinggal di daerah perkotaan sebanyak 118 320 256 jiwa (49,79 persen) dan di daerah perdesaan sebanyak 119 321 070 jiwa (50,21 persen). Penyebaran penduduk menurut pulau-pulau besar adalah: pulau Sumatera yang luasnya 25,2 persen dari luas seluruh wilayah Indonesia dihuni oleh 21,3 persen penduduk, Jawa yang luasnya 6,8 persen dihuni oleh 57,5 persen penduduk, Kalimantan yang luasnya 28,5 persen dihuni oleh 5,8 persen penduduk, Sulawesi yang luasnya 9,9 persen dihuni oleh 7,3 persen penduduk, Maluku yang luasnya 4,1 persen dihuni oleh 1,1 persen penduduk, dan Papua yang luasnya 21,8 persen dihuni oleh 1,5 persen penduduk. Sementara kota - kota dengan jumlah penduduk terbesar adalah Jakarta sebanyak 9.586.705 jiwa, berikutnya ada Surabaya 2.765.487 jiwa dan Bandung sebanyak 2.394.873 jiwa.

4.1.2 Pengangguran

Pengangguran terjadi karena pertumbuhan penduduk lebih tinggi dibandingkan dengan pertumbuhan lapangan kerja yang ada. Salah satu faktor yang diduga menjadi penyebab terjadinya ketidakseimbangan pasar tenaga kerja tersebut adalah ketidakcocokan keinginan atau kebutuhan antara pasar tenaga kerja dengan pengguna tenaga kerja. Selain itu faktor-faktor yang mungkin jadi penyebab tingginya pengangguran adalah pertumbuhan ekonomi, investasi, pengeluaran pemerintah dan upah minimum.

Berdasarkan lampiran 1.b diketahui bahwa ada beberapa provinsi dengan tingkat pengangguran terbesar di Indonesia, Banten menjadi provinsi penyumbang terbesar tingkat pengangguran di Indonesia dengan rata – rata mencapai 10 persen, diikuti provinsi Maluku dengan rata – rata 9.77, di peringkat ketiga ada provinsi Aceh dengan rata – rata 9.42 persen. Untuk provinsi penyumbang tingkat pengangguran terendah di Indonesia adalah Bali dan Sulawesi Barat dimana kedua provinsi tersebut berada pada angka rata – rata 2 persen.

4.1.3 Pertumbuhan Ekonomi

Pertumbuhan ekonomi merupakan kenaikan output dalam jangka panjang yang di ukur dengan memperhatikan pertumbuhan Produk Domestik Bruto Regional (PDRB) dari tahun ke tahun. Pertumbuhan ekonomi berperan penting dalam program pembangunan yang di rancang untuk mengentaskan pengangguran. Pertumbuhan ekonomi yang cepat dan pemerataan distribusi pendapatan harus di pisahkan sebagai tujuan – tujuan pembangunan.

Pertumbuhan ekonomi dapat digunakan sebagai indikator kesejahteraan penduduk suatu negara, semakin tinggi pertumbuhan ekonomi maka sektor riil dalam suatu negara tersebut juga mengalami peningkatan. Pertumbuhan ekonomi yang baik adalah pertumbuhan ekonomi yang menyerap tenaga kerja dan mengurangi jumlah pengangguran.

Berdasarkan lampiran 1.c Terdapat 20 provinsi yang setiap tahun Pertumbuhan ekonominya di atas 5 persen, Provinsi tersebut ialah Sumatera Utara, Sumatera Barat, Bengkulu, Lampung, Kepulauan Riau, DKI Jakarta, Jawa Barat, Jawa Tengah, Jawa Timur, Banten, Bali, Nusa Tenggara Timur, Kalimantan Tengah, Sulawesi Utara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Maluku. Meskipun berada di atas 5 persen dalam 5 tahun terakhir tahunnya Provinsi DKI Jakarta dan Banten mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahunnya.

Meskipun mengalami penurunan pertumbuhan ekonomi dari tahun ke tahunnya pada lampiran 1.b menunjukkan tingkat pengangguran di Provinsi DKI Jakarta dari tahun ke tahun justru mengalami penurunan.

4.1.4. Investasi

Investasi adalah suatu kegiatan penanaman modal yang dilakukan oleh investor dalam negeri maupun luar negeri. Investasi memiliki peranan penting dalam menggerakkan perekonomian suatu daerah. Semakin tinggi suatu investasi diharapkan output yang dihasilkan juga akan semakin meningkat. Output yang tinggi nantinya akan menciptakan lapangan pekerjaan baru.

Data investasi yang digunakan dalam penelitian ini berupa jumlah nilai investasi Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN) dan Penanaman Modal Asing (PMA) dari 33 Provinsi di Indonesia tahun 2011 - 2015. Data tersebut digunakan sebagai indikator investasi agar dapat melihat partisipasi secara total dari pihak investor dalam meningkatkan pembangunan di 33 Provinsi di Indonesia.

Berdasarkan lampiran 1.d bisa dilihat Jawa Barat masih menjadi Provinsi dengan rata – rata total investasi terbesar di Indonesia disusul Jawa Timur dan DKI Jakarta, ketiga Provinsi tersebut masih menjadi pilihan utama para investor menanamkan modalnya untuk keberlangsungan pembangunan, terbukti dari data yang ada total investasi ketiga Provinsi yang cukup tinggi. Terdapat 5 Provinsi dengan rata – rata total Investasi yang cukup rendah yaitu Bengkulu, Nusa Tenggara Timur, Gorontalo, Sulawesi Barat dan Maluku.

Provinsi Jawa Barat yang dalam 5 tahun terakhir total investasinya mengalami kenaikan setiap tahunnya, namun meskipun mengalami kenaikan pada lampiran 1.b menunjukkan tingkat pengangguran di Provinsi Jawa Barat cenderung fluktuatif dalam 5 tahun terakhir.

4.1.5 Pengeluaran Pemerintah

Pengeluaran pemerintah secara keseluruhan sangat penting dalam sumbangannya terhadap pembangunan nasional, tetapi yang lebih penting lagi adalah penentuan komposisi dari pengeluaran pemerintah. Komposisi dari pengeluaran pemerintah merupakan strategi untuk mencapai sasaran dari pembangunan nasional. Pengeluaran pemerintah yang di fokuskan disini adalah

belanja modal yang sifatnya menambah aset tetap pemerintah sehingga terjadi pembangunan infrastruktur yang mana diharapkan dapat menyerap tenaga kerja.

Berdasarkan lampiran 1.e Provinsi DKI Jakarta berada di posisi pertama dengan pengeluaran pemerintah terbesar setiap tahunnya, dalam 4 tahun terakhir pengeluaran Pemerintah DKI Jakarta berada di atas 10 triliun setiap tahunnya, sama halnya DKI Jakarta, Pengeluaran pemerintah Papua setiap tahunnya terus mengalami kenaikan berbeda dengan provinsi – provinsi lain yang pengeluaran pemerintahnya setiap tahun cenderung fluktuatif, Dan diantara semua Provinsi yang berada di Indonesia pengeluaran pemerintah Gorontalo yang paling terkecil dengan rata – rata Rp.192.626.000.000/tahun.

Jika melihat Tingkat Pengangguran pada lampiran 1.b Provinsi DKI Jakarta setiap tahun mengalami penurunan, hal ini justru berbeda dengan Provinsi Papua meskipun setiap tahun mengalami kenaikan pada jumlah investasi namun tingkat pengangguran di Papua mengalami fluktuatif dalam 5 tahun terakhir.

4.1.3. Upah Minimum Provinsi

Upah minimum provinsi atau disingkat (UMP) adalah upah minimum yang berlaku untuk seluruh kabupaten/kota di suatu provinsi. Dahulu Upah Minimum Provinsi dikenal dengan istilah Upah Minimum Regional Tingkat 1 Dasar Hukum penetapan UMP adalah Peraturan Menteri Tenaga Kerja dan Transmigrasi Nomor 7 Tahun 2013 tentang Upah Minimum. UMP ditetapkan oleh gubernur dengan memperhatikan rekomendasi Dewan Pengupahan Provinsi.

Penetapan upah dilaksanakan setiap tahun melalui proses yang panjang. Mula – mula Dewan Pengupahan Daerah (DPD) yang terdiri dari birokrat, akademisi, buruh dan pengusaha mengadakan rapat, membentuk tim survei dan turun ke lapangan mencari tahu harga sejumlah kebutuhan yang dibutuhkan pegawai, karyawan dan buruh. Setelah survei di sejumlah kota dalam provinsi tersebut yang dianggap representatif, maka diperoleh angka Kebutuhan Hidup Layak (KHL) yang dahulu disebut dengan Kebutuhan Hidup Minimum (KHM). Berdasarkan KHL, DPD mengusulkan upah minimum regional (UMR) kepada Gubernur untuk disahkan. Komponen kebutuhan hidup layak digunakan sebagai dasar penentuan upah minimum berdasarkan kebutuhan hidup pekerja lajang (belum menikah).

Berdasarkan lampiran 1.f bisa dilihat setiap Provinsi memiliki tren positif setiap tahunnya untuk Upah Minimum Provinsi, DKI Jakarta dalam 5 tahun terakhir mengalami kenaikan yang cukup tinggi ketimbang Provinsi lainnya, Adapun Provinsi Jawa Tengah dalam 5 tahun terakhir masih menduduki Provinsi dengan UMP terendah di Indonesia dengan rata – rata Rp.856.000/bulan. Dari lampiran 1.b untuk tingkat pengangguran, DKI Jakarta pada tahun 2011 berada pada angka paling tertinggi dari Provinsi – Provinsi yang lain sebesar 11.69 persen, namun meskipun mengalami kenaikan UMP setiap tahunnya justru tingkat pengangguran di Provinsi tersebut mengalami penurunan dari tahun ke tahun selama 5 tahun terakhir. Provinsi Jawa Tengah yang memiliki UMP terendah di Indonesia memiliki tingkat pengangguran yang cenderung fluktuatif tiap tahunnya.

4.1.7 Pertumbuhan Penduduk

Jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun mengalami peningkatan. Penyebab pertambahan penduduk yang utama karena adanya kelahiran. Tingkat kelahiran yang tidak dapat dikontrol akan menyebabkan dampak yang kurang baik. Peningkatan jumlah penduduk utamanya penduduk usia produktif jika tidak diikuti yang dengan peningkatan lapangan pekerjaan maka akan menyebabkan terjadinya banyak pengangguran.

Kontrol akan peningkatan jumlah penduduk sangat perlu dilakukan untuk mengatasi ketidakseimbangan pasar tenaga kerja. Dengan mengontrol peningkatan jumlah penduduk serta meningkatkan lapangan pekerjaan diharapkan akan mengurangi pengangguran. Hal tersebut akan dapat mengatasi permasalahan tingkat pengangguran yang selama ini belum dapat terpecahkan.

Berdasarkan lampiran 1.g Pertumbuhan Penduduk usia produktif terbesar berada di Provinsi Papua Barat dengan rata - rata 3,83 persen pertahunnya, berikutnya ada Provinsi Kalimantan Tengah yang setiap tahunnya rata – rata pertumbuhan penduduk usia produktif pertahunnya sebesar 3,61 persen. Adapun provinsi – provinsi yang berada di pulau Jawa tingkat pertumbuhan penduduk usia produktifnya cenderung memiliki nilai rata – rata yang cukup rendah ketimbang provinsi yang berada di luar pulau tersebut. Untuk pertumbuhan penduduk usia produktif di setiap provinsi yang berada di Indonesia mengalami kenaikan yang fluktuatif dalam 5 tahun terakhir.

4.2 Hasil Analisis

Penelitian ini menggunakan analisis data panel (panel pooled data) yang merupakan gabungan data cross section dan time series. Dengan kata lain, data panel merupakan data dari beberapa individu yakni provinsi Indonesia yang diamati dalam kurun waktu 2011 - 2015 untuk memperoleh informasi tentang pengaruh variabel-variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1), Investasi (X2), Pengeluaran Pemerintah (X3), Upah Minimum Provinsi (X4) dan Pertumbuhan Penduduk (X5) terhadap Pengangguran (Y). Metode estimasi awal yang digunakan adalah Ordinar Least Square (OLS) dengan pendekatan *common effect* model yang sebelumnya telah ditentukan berdasarkan pengujian penentuan metode estimasi Chow Test pada Lampiran Untuk memperoleh hasil estimasi sebagaimana yang diharapkan, pengolahan data dalam penelitian ini menggunakan software Eviews 8.0.

4.2.1 Pengujian Asumsi Klasik

a) Uji Multikolinearitas

Multikolinier ialah kondisi dimana adanya hubungan antara variabelvariabel bebas. Jika multikolinier itu sempurna maka setiap koefisien regresi dari variabel-variabel bebasnya tidak dapat menentukan dan standar errornya tidak terbatas. Jika multikolinier kurang dari sempurna maka koefisien regresi walaupun bisa menentukan, tetapi memiliki standar error yang besar (dalam hubungan dengan koefisien mereka itu sendiri), yang berarti koefisien-koefisiennya tidak bisa diestimasi dengan akurasi yang tepat.

Cara umum untuk mendeteksi adanya multikolinear dalam model ialah dengan melihat adanya R^2 yang lebih tinggi dalam model tetapi tingkat signifikansi t-statistiknya sangat kecil dari hasil regresi tersebut dan cenderung banyak yang tidak signifikan. Selain itu untuk menguji multikolinear, bisa dilihat matrik korelasinya. Jika masing-masing variabel bebas berkorelasi lebih besar dari 80 persen maka termasuk yang memiliki hubungan yang tinggi atau ada indikasi multikolinearitas (Gujarati: 2003).

Tabel 4.1

Output Pengujian Multikolinearitas

	PEK	INV	PPEM	UMP	PPEN
PEK	1.000000	-0.046851	-0.247112	-0.136058	0.115326
INV	-0.046851	1.000000	0.698373	0.091124	0.256744
PPEM	-0.247112	0.698373	1.000000	0.367674	0.124260
UMP	-0.136058	0.091124	0.367674	1.000000	-0.145840
PPEN	0.115326	0.256744	0.124260	-0.145840	1.000000

Sumber : Data sekunder (lampiran) yang di olah dari eviews 8.0

Dari matriks korelasi pada Tabel 4.1 terlihat bahwa hubungan antara variabel independennya semuanya di bawah 80 persen sehingga bisa disimpulkan bahwa tidak terdapat masalah multikolinear di dalam model.

b) Uji Autokorelasi

Autokorelasi ini umumnya terjadi pada data time series. Konsekuensi dari adanya autokorelasi pada model ialah bahwa penaksir tidak efisien dan uji t serta uji F yang biasa tidak valid walaupun hasil estimasi tidak bias (Gujarati: 2003). Pengujian yang bisa digunakan untuk meneliti kemungkinan terjadinya autokorelasi adalah uji Durbin-Watson (D-W). Metode Durbin-Watson ini mengasumsikan adanya

first order autoregressive AR(1) dalam model. Kriteria pengujian Autokorelasi di tunjukkan oleh Tabel 4.2

Tabel 4.2
Pengujian Autokorelasi

Null Hipotesis	Hasil Estimasi	Kesimpulan
H_0	$0 < dw < dL$	Tolak
H_0	$dL \leq dw \leq du$	Tidak ada kesimpulan
H_1	$4 - dL < dw < 4$	Tolak
H_1	$4 - du \leq dw \leq 4 - dL$	Tidak ada kesimpulan
Tidak ada autokorelasi, baik positif maupun negatif	$du < dw < 4 - du$	Terima

Sumber: Basic Econometrics, Damodar Gujarati(2003)

Hipotesa dari uji tersebut ialah :

1. $H_0 : \rho = 0$

$H_1 : \rho > 0$ Artinya jika $d > dU$, H_0 ditolak pada tingkat α sehingga secara statistik terdapat autokorelasi yang signifikan.

2. $H_0 : \rho = 0$

$H_1 : \rho < 0$ Artinya jika $(4-d) < dU$, H_0 ditolak pada tingkat α , sehingga secara statistik mengandung autokorelasi negatif yang signifikan.

3. $H_0 : \rho = 0$ $H_1 :$

$\rho \neq 0$ Artinya jika $d < dU$ atau $(4-d) < dU$, H_0 ditolak pada tingkat 2α , sehingga secara statistik terlihat bahwa adanya autokorelasi baik positif maupun negatif yang signifikan.

Dari hasil estimasi yang telah diperoleh dengan menggunakan software Eviews 8 pada tahapan sebelumnya, diperoleh hasil pada Tabel 4.3

Tabel 4.3

Output Uji Autokorelasi Metode Durbin-Watson

R-squared	0.916400	Mean dependent var	7.281180
Adjusted R-squared	0.892044	S.D. dependent var	5.395999
S.E. of regression	0.887842	Sum squared resid	100.1094
F-statistic	37.62515	Durbin-Watson stat	2.036369
Prob(F-statistic)	0.000000		
Positif Autokorelasi	Tidak Tentu	Tidak Ada Autokorelasi	Tidak Tentu
			Negatif Autokorelasi

0 dL = 1,68 dU = 1,80 4 - dU = 2,20 4 - dL = 2,32

Sumber: Data sekunder (lampiran) yang diolah dari Eviews 8.0

Pengujian berdasarkan Tabel 4.3 diatas didahului dengan mencari titik signifikansi dari dL dan dU pada pada tingkat signifikansi 0,1 dengan n=165 dan k'(jumlah variabel)=6. Nilai tabel dL =1,68 dan dU=1,80. Karena 2.036369 berada di daerah yang tidak mengandung autokorelasi maka bisa disimpulkan bahwa di dalam model, tidak terdapat autokorelasi.

c) Uji Heteroskedastisitas

Pengujian Heteroskedastisitas dilakukan untuk menguji apakah varian dari dua observasi dalam penelitian sama (homogen) untuk semua variabel terikat dengan variabel bebas sehingga hasil estimasi tidak bias. Identifikasi ada atau tidaknya permasalahan Heteroskedastisitas dilakukan melalui Uji White Heteroskedasticity test.

Tabel 4.4
Output Uji Heteroskedastisitas Metode White

Heteroskedasticity Test: White

F-statistic	1.722627	Prob. F(5,159)	0.1323
Obs*R-squared	8.478856	Prob. Chi-Square(5)	0.1317
Scaled explained SS	13.97180	Prob. Chi-Square(5)	0.0158

Sumber: Data sekunder (lampiran) yang diolah dari Eviews 8.0

Berdasarkan hasil pengujian pada tabel 4.4 di atas, menunjukan Uji White diperoleh nilai Obs*R-squared 8.478856 dan nilai Prob Chi-square(5) sebesar 0.1317. Hasil pengujian menunjukan tidak terdapat masalah heterokedastisitas, dimana nilai (Prob Chi-square) lebih dari alpa (0,1).

4.2.2 Hasil Penelitian Pengaruh Indikator Makroekonomi, Upah Minimum dan Demografis terhadap Pengangguran di Indonesia

Hasil regresi model pengaruh variabel pertumbuhan ekonomi (X1), investasi (X2), pengeluaran pemerintah (X3), upah minimum provinsi (X4), dan pertumbuhan penduduk (X5) terhadap pengangguran (Y) diperoleh R-Square sebesar 0,38 pada Tabel 4.5. Hal ini berarti variasi dari variabel independen upah minimum provinsi (X1), investasi (X2), pengeluaran pemerintah (X3), pertumbuhan ekonomi (X4), dan pertumbuhan penduduk (X5) dapat menjelaskan variasi variabel pengangguran (Y) di Indonesia sebesar 38 persen. Adapun sisa variasi merupakan variasi variabel lain diluar model sebesar 62 persen.

Tabel 4.5
Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Investasi, Pengeluaran Pemerintah, Upah Minimum Provinsi dan Pertumbuhan Penduduk terhadap Pengangguran di Indonesia Periode 2011 - 2015

Variabel	Koefisien Model			Prob		
	PLS	FEM	REM	PLS	FEM	REM
C	-4.720434	3.885527	4.819326	0.4799	0.5480	0.3785
PEK	-0.037788	0.003070	0.018380	0.0531	0.9332	0.6067
INV	-0.036773	-0.012116	0.073854	0.7782	0.9318	0.5469
PPEM	-1.303375	-0.493771	0.125692	0.0000	0.0677	0.5917
UMP	0.891343	0.103584	-0.351062	0.0504	0.7554	0.2510
PPEN	0.293293	0.300797	0.003660	0.0000	0.0001	0.9450
R2	0.385940	0.880567	0.011265			
Prob. F-statisitk	0.000000	0.000000	0.873960			

Sumber: Data sekunder yang diolah dari Eviews 8 (lampiran)

Hasil penelitian variabel Pertumbuhan Ekonomi (X1) pada Tabel menunjukkan nilai probabilitas (0,0531) kurang dari alpha (0,1). Koefisien Pertumbuhan Ekonomi menunjukkan angka -0,037. Artinya setiap kenaikan Pertumbuhan Ekonomi sebesar 1 persen mengakibatkan penurunan pengangguran sebesar -0,037 persen. Dengan demikian pertumbuhan ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran di Indonesia periode 2011 - 2015.

Hasil penelitian variabel Investasi (X2) pada Tabel menunjukkan nilai probabilitas (0,7782) lebih dari alpha (0,1). Koefisien regresi investasi menunjukkan angka -0,036. Dengan demikian Investasi berpengaruh negatif dan tidak signifikan terhadap Pengangguran di Indonesia periode 2011 - 2015.

Hasil penelitian variabel Pengeluaran Pemerintah (X3) pada Tabel menunjukkan nilai probabilitas (0,000) kurang dari alpha (0,1). Koefisien regresi pengeluaran pemerintah menunjukkan angka -1,303. Artinya setiap kenaikan Pengeluaran Pemerintah sebesar 1 persen mengakibatkan penurunan

Pengangguran sebesar -1,303 persen. Dengan demikian Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran di Indonesia periode 2011 - 2015.

Hasil penelitian variabel Upah Minimum Provinsi (X4) pada Tabel menunjukkan nilai probabilitas (0,504) kurang dari alpha (0,1). Koefisien regresi Upah Minimum Provinsi menunjukkan angka 0,891. Artinya setiap kenaikan Upah Minimum Provinsi sebesar 1 persen mengakibatkan peningkatan pengangguran sebesar 0,891 persen. Dengan demikian Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengangguran di Indonesia periode 2011 - 2015

Kemudian untuk variabel Pertumbuhan penduduk (X5) pada Tabel menunjukkan nilai probabilitas (0,0000) kurang dari alpha (0,1). Koefisien regresi pertumbuhan penduduk menunjukkan angka 0,293 artinya setiap kenaikan pertumbuhan penduduk sebesar 1 persen mengakibatkan peningkatan pengangguran sebesar 0,293 persen. Dengan demikian Pertumbuhan Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengangguran di Indonesia periode 2011 - 2015.

4.3 Pembahasan Hasil Analisis

4.3.1 Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indonesia

Pertumbuhan ekonomi berarti perkembangan kegiatan dalam perekonomian yang menyebabkan barang dan jasa yang diproduksi dalam masyarakat bertambah dan kemakmuran masyarakat meningkat. Oleh karena itu konsep yang sesuai dengan pertumbuhan ekonomi adalah GDP dengan harga konstan. GDP adalah nilai

barang-barang dan jasa-jasa yang diproduksi di dalam negara tersebut dalam satu tahun tertentu.

Hal yang di harapkan dari pertumbuhan ekonomi melalui penambahan GDP akan berpengaruh terhadap jumlah pengangguran, Setiap adanya peningkatan terhadap persentase pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan yang berorientasi pada padat karya, akan memberikan peluang dan kesempatan kerja yang lebih besar terhadap pekerja, sehingga jumlah pengangguran pun dapat dikurangi.

Namun berdasarkan beberapa penelitian terdahulu menunjukkan hasil yang berbeda, hubungan Pertumbuhan Ekonomi dan jumlah pengangguran bersifat positif dan negatif. Pertumbuhan ekonomi melalui GDP yang bersifat positif dikarenakan pertumbuhan ekonomi tidak dibarengi oleh peningkatan kapasitas produksi, sehingga pengangguran tetap meningkat seiring dengan pertumbuhan ekonomi. Pertumbuhan ekonomi yang meningkat ini berorientasi pada padat modal, di mana kegiatan produksi untuk memacu output dan menghasilkan pendapatan yang meningkat lebih diutamakan ketimbang pertumbuhan ekonomi yang berorientasi pada padat karya.

Sejalan dengan hipotesis dari penelitian ini variabel pertumbuhan ekonomi menunjukkan pengaruh yang signifikan dan negatif terhadap pengangguran di Indonesia. Hasil ini didukung oleh penelitian Qomariyah (2014) menyatakan dengan meningkatnya laju pertumbuhan ekonomi suatu negara maka output yang dihasilkan menjadi lebih banyak dari tahun sebelumnya, dengan demikian perusahaan akan

membutuhkan lebih banyak pekerja ketika produksi meningkat sehingga kesempatan kerja meningkat dan pengangguran akan mengalami penurunan.

4.3.2 Pengaruh Investasi terhadap pengangguran di Indonesia

Investasi sebagai indikator dari tumbuh kembangnya ekonomi di suatu wilayah atau daerah. Investasi merupakan faktor yang mempengaruhi pembangunan ekonomi, dan investasi sebagai salah satu faktor yang mempengaruhi kesempatan kerja. Munculnya investasi akan mendorong munculnya proses produksi (output) dan output tersebut salah satu dihasilkan oleh manusia di dalamnya.

Besarnya nilai investasi akan menentukan besarnya permintaan tenaga kerja. Semakin besar investasi maka semakin besar pula tambahan penggunaan tenaga kerja. Untuk perkembangan sektor industri perlu adanya investasi yang memadai agar dalam mengembangkan sektor industri dapat berjalan sesuai yang diinginkan. Usaha akumulasi modal dapat melalui kegiatan investasi yang akan menggerakkan perekonomian melalui mekanisme permintaan agregat, dimana akan meningkatkan usaha produksi dan pada akhirnya akan mampu meningkatkan permintaan tenaga kerja.

Pada hasil estimasi penelitian ini justru menunjukkan bahwa investasi tidak berpengaruh terhadap pengangguran di Indonesia. Hasil ini serupa dengan hasil dari penelitian Rahmawati (2012) dan Wasilaputri (2016) menunjukkan bahwa investasi berpengaruh tidak signifikan terhadap variabel kesempatan kerja. Hal ini menjelaskan bahwa tingginya investasi tidak serta merta dapat menaikkan kesempatan kerja dan menunjukkan bahwa investasi bukan indikator penting untuk menaikkan kesempatan kerja. Tidak adanya pengaruh dimungkinkan karena para

pemilik usaha dalam menggunakan investasinya lebih cenderung untuk membeli barang modal dalam bentuk mesin – mesin sebagai pendukung proses produksi.

4.3.3 Pengaruh Pengeluaran Pemerintah terhadap Pengangguran di Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa pengeluaran pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap pengangguran. Jika pengeluaran pemerintah meningkat maka akan berpengaruh terhadap penurunan pengangguran. Sebaliknya, pengangguran akan mengalami peningkatan apabila pengeluaran pemerintah menurun.

Peranan pengeluaran pemerintah dalam pembangunan ekonomi terletak didalam penyediaan lapangan kerja, peningkatan pendapatan dan standar kehidupan, penurunan kesenjangan pendapatan dan kemakmuran, dalam mendorong insentif dan usaha swasta, dan dalam menciptakan keseimbangan regional dalam perekonomian.

Pemerintah dalam upaya menyediakan barang publik secara tidak langsung akan membuka kesempatan kerja. Lapangan kerja yang tersedia akibat dari aktivitas pemerintah akan dipengaruhi oleh jenis pengeluaran. Misalnya, proyek-proyek pemerintah yang membutuhkan padat karya akan lebih membutuhkan banyak tenaga kerja pada masyarakat.

Hasil ini di dukung oleh penelitian Danawati, dkk, (2016) yang menyatakan pengeluaran pemerintah secara langsung berpengaruh positif dan signifikan terhadap kesempatan kerja kabupaten/kota di Provinsi Bali. Hal ini menandakan

bahwa proyek - proyek pembangunan di Indonesia sedang melaju pesat sehingga mampu membuka lapangan kerja lebih banyak.

4.3.4 Pengaruh Upah Minimum Provinsi terhadap Pengangguran di Indonesia

Kenaikan upah minimum akan menaikkan pengangguran di Indonesia, hal ini mendorong peningkatan tingkat pengangguran apabila upah minimum dinaikkan maka perusahaan cenderung mengurangi tenaga kerjanya. Hal ini sejalan dengan teori, menurut Sukirno (2006) karena untuk mengurangi karyawan oleh pabrik apabila harus menambah tingkat upah, dengan adanya peningkatan upah dalam hal ini UMP, maka akan menambah biaya tenaga kerja, biaya tenaga kerja dapat dikurangi dengan mengurangi tenaga kerja dengan adanya efisiensi.

Kebijakan upah minimum sering dijadikan pokok permasalahan yang menyebabkan tingkat upah riil menjadi kaku. Hal ini dikarenakan upah minimum merupakan kewajiban legal dan harus diikuti oleh setiap perusahaan serta memiliki kekuatan hukum, dimana perusahaan tidak boleh memberikan upah di bawah upah minimum. Selain itu, upah minimum sering dijadikan alasan bagi serikat buruh untuk mencegah terjadinya penurunan upah di bawah upah minimum.

Setiap perusahaan tentunya mempunyai tujuan untuk memaksimalkan laba. Perusahaan akan mengganti input lain yang relatif lebih mahal dengan input yang relatif lebih murah. Apabila upah tenaga kerja meningkat akibat upah minimum provinsi maka perusahaan akan berusaha mengganti dengan input lain yang lebih murah atau mengurangi jumlah tenaga kerja agar keuntungan yang diperoleh maksimal. Adanya kenaikan upah minimum menyebabkan perubahan proses

produksi yang padat tenaga kerja dengan proses produksi yang lebih padat modal dan lebih menuntut keterampilan.

Hasil penelitian ini sejalan dengan penelitian Kristiyana (2011) yang menyatakan semakin tinggi upah maka menyebabkan meningkatnya jumlah pengangguran terbuka, dikarenakan semakin tinggi upah yang harus dibayar pengusaha justru akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang dimiliki sehingga menyebabkan jumlah pengangguran bertambah.

4.3.5 Pengaruh Pertumbuhan Penduduk terhadap Pengangguran di Indonesia

Berdasarkan hasil estimasi menunjukkan bahwa pertumbuhan penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap pengangguran. Maksud dari pengaruh positif ini adalah terdapat indikasi hubungan kuat antara pertumbuhan penduduk dan pengangguran. Jika pertumbuhan penduduk meningkat maka akan berpengaruh pada peningkatan pengangguran. Sebaliknya, Apabila pertumbuhan penduduk mengalami penurunan maka mengakibatkan penurunan pengangguran.

Pertumbuhan penduduk usia produktif akan mengakibatkan kenaikan jumlah angkatan kerja. Akan tetapi, kenaikan jumlah angkatan kerja tersebut, tidak dibarengi oleh meningkatnya kesempatan kerja, akibatnya angkatan kerja yang jumlahnya bertambah tersebut, tidak di distribusikan ke lapangan pekerjaan. Hal ini akan berdampak pada jumlah pengangguran yang terus bertambah.

Pernyataan di atas didukung oleh penelitian Isnaeni (2016), dimana pertumbuhan penduduk akan berpengaruh positif terhadap jumlah pengangguran di Kabupaten/Kota Provinsi Jawa Tengah.

BAB V

PENUTUP

5.1 Kesimpulan

Berdasarkan pada hasil penelitian dan pembahasan yang telah diuraikan sebelumnya maka disimpulkan sebagai berikut:

1. Variabel Pertumbuhan Ekonomi berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran di Indonesia. Jika Pertumbuhan Ekonomi meningkat maka akan berpengaruh terhadap penurunan Pengangguran. Sebaliknya, Pengangguran akan mengalami peningkatan apabila Pertumbuhan Ekonomi menurun. Dengan meningkatnya laju Pertumbuhan Ekonomi suatu negara maka output yang dihasilkan menjadi lebih banyak dari tahun sebelumnya, dengan demikian perusahaan akan membutuhkan lebih banyak pekerja ketika produksi meningkat sehingga kesempatan kerja meningkat dan Pengangguran akan mengalami penurunan.
2. Variabel Pengeluaran Pemerintah berpengaruh negatif dan signifikan terhadap Pengangguran di Indonesia. Jika Pengeluaran Pemerintah meningkat maka akan berpengaruh terhadap penurunan Pengangguran. Sebaliknya, Pengangguran akan mengalami peningkatan apabila Pengeluaran Pemerintah menurun. Pemerintah dalam upaya menyediakan barang publik secara tidak langsung akan membuka kesempatan kerja. Lapangan kerja yang tersedia akibat dari aktivitas pemerintah. Misalnya, proyek-proyek pemerintah yang membutuhkan padat karya akan lebih membutuhkan banyak tenaga kerja pada masyarakat.

3. Variabel Upah Minimum Provinsi berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengangguran di Indonesia. Jika Upah Minimum Provinsi meningkat maka akan berpengaruh terhadap peningkatan Pengangguran. Semakin tinggi upah maka menyebabkan meningkatnya jumlah Pengangguran, dikarenakan semakin tinggi upah yang harus dibayar pengusaha justru akan mengurangi jumlah tenaga kerja yang dimiliki sehingga menyebabkan jumlah pengangguran bertambah.

4. Variabel Pertumbuhan Penduduk berpengaruh positif dan signifikan terhadap Pengangguran di Indonesia. Jika Pertumbuhan Penduduk meningkat maka akan berpengaruh terhadap peningkatan Pengangguran. Pertumbuhan Penduduk akan mengakibatkan kenaikan jumlah angkatan kerja. Akan tetapi, kenaikan jumlah angkatan kerja tersebut, tidak dibarengi oleh meningkatnya kesempatan kerja, akibatnya angkatan kerja yang jumlahnya terus bertambah tersebut, tidak didistribusikan ke lapangan pekerjaan. Hal ini akan berdampak pada jumlah pengangguran yang terus bertambah.

5.2 Saran

Berdasarkan kesimpulan dari hasil penelitian diatas, maka pada bagian ini dikemukakan beberapa saran baik untuk kepentingan praktis maupun pengembangan penelitian selanjutnya sebagai berikut :

1. Dalam peningkatan terhadap persentase pertumbuhan ekonomi diharapkan akan menyerap tenaga kerja. Pertumbuhan yang berorientasi pada padat karya, akan memberikan peluang dan kesempatan kerja yang lebih besar terhadap pekerja, sehingga jumlah pengangguran pun dapat dikurangi.

2. Dalam pengalokasian Pengeluaran Pemerintah, diharapkan pemerintah tetap memberikan alokasi yang lebih besar di bidang pembangunan proyek – proyek dan infrastruktur untuk kegiatan yang dapat menyerap tenaga kerja yang lebih banyak sehingga menurunkan angka pengangguran.
3. Upah Minimum merupakan kewajiban legal dan harus diikuti oleh setiap perusahaan serta memiliki kekuatan hukum, dimana perusahaan tidak boleh memberikan upah di bawah upah minimum. Melalui kebijakannya terkait upah pemerintah diharapkan lebih mempertimbangkan dari sisi perusahaan – perusahaan dalam menentukan upah minimum yang harus di berikan oleh perusahaan – perusahaan terhadap pekerjanya.
4. Dalam hal Pertumbuhan Penduduk, diharapkan pemerintah agar dapat mengontrol pertumbuhan penduduk, peningkatan penduduk adalah penambahan tenaga kerja baru. Jika tenaga kerja baru ini tidak dapat diimbangi dengan kesempatan kerja yang tersedia, maka akan menambah pengangguran.
5. Dalam Bagi peneliti selanjutnya dengan topik yang sejenis disarankan untuk melakukan kajian lebih lanjut dengan memasukkan variabel independen lainnya. Berikutnya, memperpanjang periode penelitian dan menggunakan alat analisis yang lebih akurat demi mendapatkan hasil penelitian yang lebih mendekati fenomena sesungguhnya.

Daftar Pustaka

Alghofari, Farid. 2010. Analisis Tingkat Pengangguran Di Indonesia Tahun 1980 – 2007. Jurnal Ekonomi Pembangunan, 2010. Jawa Tengah.

Anoraga dan Pakarti, 2006. Pengantar Pasar Modal, Rineka Cipta, Jakarta.

Arfida. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Jakarta : Ghalia Indonesia.

Arsyad, Lincolin. 2010. Ekonomi Pembangunan, edisi 5. Yogyakarta: UPP STIM YKPN.

Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Pengangguran 2011-2015. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Upah Minimum Provinsi 2011-2015. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Investasi PMDN dan PMA 2011-2015. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik Pengeluaran Pemerintah 2011-2015. Jakarta: BPS.

Badan Pusat Statistik. 2016. Statistik PDRB harga konstan 2010 2011-2015. Jakarta: BPS.

Bastian, Indra. 2006. Sistem Perencanaan dan Penganggaran Pemerintahan Daerah di Indonesia, Salemba Empat. Jakarta.

Cita, P.F. Kadek dan Wirawan, N.P. I Gusti. 2016. Pengaruh Pertumbuhan Penduduk dan Struktur Ekonomi terhadap Pertumbuhan Ekonomi dan Pengangguran di Indonesia

Danawati, Sri, Bandesa, I K.G., dan Utama, S. Made. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali. Jurnal Ekonomi dan Bisnis.

Darman. 2013. Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran : Analisis Hukum Okun.

Dumairy. 1996. Perekonomian Indonesia. Jakarta: Erlangga.

- Ferdinan, Hery. 2011. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah, PDRB, dan Upah Rill Terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Sumatera Barat.
- Gujarati, Damodar. 1978. Ekonometrika Dasar. Zain S. [penerjemah]. Hutaeruk G. [editor]. Erlangga, Jakarta. Terjemahan dari : Basic Econometrics.
- Gujarati, Damodar. 2003. Ekonometrika Dasar. (Edisi Alih Bahasa Terjemahan). Jakarta: Erlangga.
- Gilarso, 2003. Pengantar ilmu Ekonomi Mikro. Penerbit Kanisius. Yogyakarta.
- Isnaeni, Fitriani. 2016. Analisis Pengaruh Jumlah Penduduk, Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi Terhadap Pengangguran Terbuka di Kabupate/Kota Provinsi Jawa Tengah Periode 2010 – 2014.
- Kristiyana. 2011. Pengaruh Upah Minimum Kabupaten/Kota (UMK), Pertumbuhan Ekonomi dan Inflasi terhadap Pengangguran Terbuka di Jawa Tengah Tahun 2004 - 2009.
- Kurniawan, B. Aditya. 2014. Analisis Pengaruh Pertumbuhan Ekonomi, Upah Minimum, dan Investasi terhadap Jumlah Pengangguran di Kabupaten Gresik.
- Mankiw, N. Gregory. 2000. Teori Makroekonomi. Edisi Keempat. Erlangga. Jakarta.
- Mankiw, N. Gregory. 2006. Pengantar Ekonomi Mikro. Salemba Empat. Jakarta.
- Mardiasmo. 2005. Akuntansi Sektor Publik Edisi 2. Penerbit Andi. Yogyakarta.
- Mulyadi, Subri. 2003. Ekonomi Sumber Daya Manusia. Raja Grafindo Persada. Jakarta.
- Muslim, R. Mohammad. 2014. Pengangguran Terbuka dan Determinannya.
- Ningsih, R. Fatmi. 2010. Pengaruh Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Pengangguran di Indoesia. Periode tahun 1988-2008 Ekonomi Pembangunan Universitas Islam Negeri.
- Panjawa, L. Jihad dan Soebagiyo, Daryono. 2014. Efek Peningkatan Upah Minimum terhadap Tingkat Pengangguran. Jurnal Ekonomi dan Studi Pembangunan.
- Prasojo, Eko. 2009. Reformasi Kedua - Melanjutkan Estafet Reformasi. Penerbit Salemba Humanika. Jakarta.

- Qomariyah, Isti. 2014. Pengaruh Tingkat Inflasi dan Pertumbuhan Ekonomi terhadap Tingkat Pengangguran di Jawa timur.
- Rachim, J. Rizka. 2013. Analisis Pengaruh Upah Minimum Provinsi, Pengeluaran Pemerintah, Investasi Swasta dan Jumlah Penduduk terhadap Pengangguran Terbuka di Provinsi Sulawesi Selatan Periode 1996 – 2010.
- Rahmawati, D. Ikka. 2012. Pengaruh Investasi dan Tingkat Upah terhadap Kesempatan Kerja di Jawa Timur.
- Riswandi. 2011. Faktor yang Mempengaruhi Pengangguran di Sumatera Barat Pasca Krisis Ekonomi pada Tahun 2000 - 2010.
- Rizki, Radewa. 2014. Pengaruh Upah Minimum, PDRB, dan Populasi Penduduk Terhadap Tingkat Pengangguran Terbuka Gerbangkertasusila Tahun 2007-2012).
- Samuelson, PA, dan Nordhaus WD. (2004). Ilmu Makroekonomi. Edisi Tujuh Belas, Diterjemahkan oleh Gretta, Thesa Tanoto, Bosco Carvallo, dan Anna Elly, PT. Media Global Edukasi, Jakarta.
- Sadono, Sukirno. 2006. Teori Pengantar Makroekonomi, Penerbit PT. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Simanjuntak, P. J. 1996. "Pengantar Ekonomi Sumberdaya Manusia". Fakultas Ekonomi, Universitas Indonesia, Jakarta.
- Sri Danawati, I K.G. Bendesa, dan Made Suyana Utama. 2016. Pengaruh Pengeluaran Pemerintah dan Investasi terhadap Kesempatan Kerja, Pertumbuhan Ekonomi serta Ketimpangan Pendapatan Kabupaten/Kota di Provinsi Bali.
- Sulistiawati, Rini. 2012. Pengaruh Upah Minimum terhadap Penyerapan Tenaga Kerja dan Kesejahteraan Masyarakat di Provinsi di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi
- Sumanto, 2006. Analisis Pengaruh Perkembangan Pasar Modal Terhadap Perekonomian Indonesia. Fakultas Ekonomi dan Manajemen, Institut Pertanian Bogor
- Sumarsono, Sony, 2009. Teori dan Kebijakan Publik Ekonomi Sumber Daya Manusia. Yogyakarta: Graha Ilmu.

- Suparmoko, M. 2002. Ekonomi Publik, Untuk Keuangan dan Pembangunan Daerah. Andi. Yogyakarta
- Syaadah, Nilatus. 2014. Analisis Dampak Pertambahan Penduduk Terhadap Penyerapan Angkatan Kerja.
- Tambunan, Tulus.T.H. 2003. Perkembangan Sektor Pertanian Di Indonesia : Beberapa Isu Penting. Jakarta : Ghalia Indonesia.
- Tirta, S. Artriyani. 2013. Analisis Pengaruh Inflasi, Pertumbuhan Ekonomi, dan Investasi terhadap Pengangguran di Provinsi Jawa Tengah.
- Undang - Undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang Ketenagakerjaan
- Undang - Undang Nomor 25 Tahun 2007 Tentang Penanaman Modal
- Wasilaputri, R. Febryana. 2016. Pengaruh Upah Minimum Provinsi, PDRB dan Investasi terhadap Penyerapan Tenaga Kerja di Pulau Jawa Tahun 2010 - 2014.
- Zulhanafi, Aimon, Hasdi, dan Syofyan, Efrizal, 2013. Analisis faktor-faktor yang mempengaruhi produktivitas dan tingkat pengangguran di Indonesia. Jurnal Kajian Ekonomi

Lampiran 1

1a Rekapitulasi Data

Provinsi	Tahun	Y	X1	X2	X3	X4	X5
Aceh	2011	9.00	3.28	26.86	28.11	14.12	1.49
Aceh	2012	9.06	3.85	28.18	27.63	14.15	1.07
Aceh	2013	10.12	2.61	29.20	28.25	14.25	3.10
Aceh	2014	9.02	1.35	29.34	28.51	14.38	3.57
Aceh	2015	9.93	-0.72	29.13	28.45	14.46	2.80
Sumatera Utara	2011	8.18	6.66	29.89	27.91	13.85	-8.94
Sumatera Utara	2012	6.28	6.45	29.81	27.54	14.00	4.13
Sumatera Utara	2013	6.45	6.07	30.40	27.54	14.13	3.60
Sumatera Utara	2014	6.23	5.23	30.13	27.77	14.22	-3.52
Sumatera Utara	2015	6.71	5.10	30.68	27.96	14.30	1.90
Sumatera Barat	2011	8.02	6.34	27.84	26.83	13.87	1.67
Sumatera Barat	2012	6.65	6.31	28.11	27.31	13.96	0.15
Sumatera Barat	2013	7.02	6.08	28.22	27.27	14.12	-0.78
Sumatera Barat	2014	6.50	5.86	28.23	27.39	14.21	5.20
Sumatera Barat	2015	6.89	5.41	28.47	27.28	14.29	0.61
Riau	2011	6.09	5.57	29.87	27.97	13.93	3.52
Riau	2012	4.37	3.76	30.44	28.07	14.03	1.97
Riau	2013	5.48	2.48	30.67	28.62	14.15	4.54
Riau	2014	6.56	2.70	30.82	28.18	14.35	2.74
Riau	2015	7.83	0.22	30.56	28.70	14.45	2.82
Jambi	2011	4.63	7.86	28.47	26.76	13.84	-5.46
Jambi	2012	3.20	7.03	28.72	26.93	13.95	1.56
Jambi	2013	4.76	6.84	28.80	27.30	14.08	-1.15
Jambi	2014	5.08	7.35	28.07	27.43	14.22	7.08
Jambi	2015	4.34	4.21	29.24	27.40	14.35	3.18
Sumatera Selatan	2011	6.60	6.36	29.54	27.67	13.86	-0.17
Sumatera Selatan	2012	5.66	6.83	29.99	27.64	13.99	3.77
Sumatera Selatan	2013	4.84	5.31	29.87	27.73	14.12	-2.44
Sumatera Selatan	2014	4.96	4.70	30.64	27.32	14.42	4.90
Sumatera Selatan	2015	6.07	4.50	30.61	28.15	14.50	1.26
Bengkulu	2011	3.46	6.85	26.75	26.16	13.61	1.48
Bengkulu	2012	3.62	6.85	26.58	26.50	13.74	2.09
Bengkulu	2013	4.61	6.07	26.70	26.43	14.00	-1.53
Bengkulu	2014	3.47	5.48	26.24	26.44	14.12	3.19
Bengkulu	2015	4.91	5.14	27.45	26.87	14.22	5.66
Lampung	2011	6.38	6.56	28.07	26.94	13.66	-9.09
Lampung	2012	5.20	6.44	27.98	27.35	13.79	3.10
Lampung	2013	5.69	5.77	28.27	27.60	13.96	-0.77
Lampung	2014	4.79	5.08	29.33	27.55	14.15	4.80
Lampung	2015	5.14	5.13	29.15	27.30	14.27	-0.67
Bangka Belitung	2011	3.86	6.90	28.24	26.77	13.84	-6.86
Bangka Belitung	2012	3.43	5.50	27.73	26.50	13.92	4.98
Bangka Belitung	2013	3.65	5.20	28.32	26.90	14.05	2.30
Bangka Belitung	2014	5.14	4.67	28.30	25.81	14.31	2.69
Bangka Belitung	2015	6.29	4.08	28.39	26.46	14.56	4.53
Kepulauan Riau	2011	5.38	6.96	28.85	26.49	13.79	-2.40
Kepulauan Riau	2012	5.08	7.63	29.29	26.54	13.83	4.67

Kepulauan Riau	2013	5.63	7.21	29.09	26.84	14.13	1.15
Kepulauan Riau	2014	6.69	6.62	29.23	27.30	14.33	2.84
Kepulauan Riau	2015	6.20	6.02	29.86	27.20	14.49	1.55
DKI Jakarta	2011	11.69	6.73	31.61	29.72	14.07	-2.74
DKI Jakarta	2012	9.67	6.53	31.51	30.02	14.24	4.13
DKI Jakarta	2013	8.63	6.07	31.26	30.39	14.60	-4.33
DKI Jakarta	2014	8.47	5.91	31.94	30.65	14.71	-0.89
DKI Jakarta	2015	7.23	5.88	31.80	30.65	14.81	0.57
Jawa Barat	2011	9.96	6.50	31.46	27.36	13.50	2.33
Jawa Barat	2012	9.08	6.50	31.59	27.88	13.57	5.90
Jawa Barat	2013	9.16	6.33	32.20	27.81	13.65	0.71
Jawa Barat	2014	8.45	5.09	32.25	27.94	13.82	1.87
Jawa Barat	2015	8.72	5.03	32.27	28.43	13.94	-2.00
Jawa Tengah	2011	7.07	5.30	29.10	26.78	13.42	1.01
Jawa Tengah	2012	5.61	5.34	29.73	27.22	13.55	2.86
Jawa Tengah	2013	6.01	5.11	30.54	27.63	13.63	0.06
Jawa Tengah	2014	5.68	5.28	30.60	28.08	13.72	0.13
Jawa Tengah	2015	4.99	5.44	30.92	28.62	13.91	-1.41
Yogyakarta	2011	4.39	5.21	26.12	25.74	13.60	2.23
Yogyakarta	2012	3.90	5.37	27.78	26.11	13.70	3.08
Yogyakarta	2013	3.24	5.47	27.19	26.40	13.76	-1.73
Yogyakarta	2014	3.33	5.16	28.05	26.82	13.80	3.81
Yogyakarta	2015	4.07	4.94	28.08	27.27	13.92	-2.57
Jawa Timur	2011	5.38	6.44	30.71	27.53	13.47	-0.07
Jawa Timur	2012	4.11	6.64	31.41	27.67	13.52	3.35
Jawa Timur	2013	4.30	6.08	31.97	27.62	11.37	1.31
Jawa Timur	2014	4.19	5.86	31.74	27.82	13.82	-1.38
Jawa Timur	2015	4.47	5.44	31.89	28.57	13.96	0.62
Banten	2011	13.74	7.03	30.81	27.21	13.82	-4.46
Banten	2012	9.94	6.83	31.08	27.67	13.86	2.05
Banten	2013	9.54	6.67	31.53	28.10	13.97	0.09
Banten	2014	9.07	5.47	31.15	28.16	14.10	3.02
Banten	2015	9.55	5.37	31.44	28.25	14.29	-0.06
Bali	2011	2.95	6.66	29.18	26.26	13.70	-0.95
Bali	2012	2.10	6.96	29.68	26.85	13.78	3.41
Bali	2013	1.83	6.69	29.68	27.25	13.98	-0.73
Bali	2014	1.90	6.73	29.36	26.64	14.25	1.44
Bali	2015	1.99	6.04	29.73	27.00	14.30	2.39
Nusa Tenggara Barat	2011	5.25	-3.91	29.09	26.71	13.70	-7.49
Nusa Tenggara Barat	2012	5.23	-1.54	29.46	26.69	13.82	2.08
Nusa Tenggara Barat	2013	5.30	5.16	29.63	26.65	13.91	0.90
Nusa Tenggara Barat	2014	5.75	5.06	29.60	26.82	14.01	3.53
Nusa Tenggara Barat	2015	5.69	21.24	29.91	27.14	14.10	1.53
Nusa Tenggara Timur	2011	3.11	5.67	26.94	25.99	13.59	-1.63
Nusa Tenggara Timur	2012	3.04	5.46	25.32	26.05	13.74	4.25
Nusa Tenggara Timur	2013	3.25	5.41	25.66	26.17	13.83	-0.53
Nusa Tenggara Timur	2014	3.26	5.05	25.99	26.73	13.96	3.32
Nusa Tenggara Timur	2015	3.83	5.02	28.44	27.06	14.04	2.68
Kalimantan Barat	2011	4.60	5.50	29.42	26.62	13.60	2.96
Kalimantan Barat	2012	3.54	5.91	29.53	26.66	13.71	0.65
Kalimantan Barat	2013	3.99	6.05	29.98	26.99	13.87	-0.63
Kalimantan Barat	2014	4.04	5.03	30.43	26.92	14.14	2.54

Kalimantan Barat	2015	5.15	4.81	30.82	27.08	14.26	1.59
Kalimantan Tengah	2011	3.54	7.01	29.75	26.76	13.94	4.87
Kalimantan Tengah	2012	3.14	6.87	29.90	26.96	14.10	2.65
Kalimantan Tengah	2013	3.00	7.37	29.68	27.34	14.26	0.92
Kalimantan Tengah	2014	3.24	6.21	30.19	27.43	14.36	2.96
Kalimantan Tengah	2015	4.54	7.01	30.26	27.61	14.46	6.65
Kalimantan Selatan	2011	6.29	6.97	29.16	27.18	13.93	2.99
Kalimantan Selatan	2012	5.19	5.97	29.45	26.99	14.02	2.06
Kalimantan Selatan	2013	3.66	5.33	30.07	27.63	14.11	-1.76
Kalimantan Selatan	2014	3.80	4.85	29.82	27.87	14.30	2.15
Kalimantan Selatan	2015	4.92	3.84	30.34	27.75	14.44	2.37
Kalimantan Timur	2011	11.43	6.47	30.12	28.32	13.90	4.20
Kalimantan Timur	2012	9.02	5.48	30.87	28.62	13.98	2.86
Kalimantan Timur	2013	7.95	2.76	31.11	28.87	14.38	-1.39
Kalimantan Timur	2014	7.38	2.17	31.31	28.42	14.45	3.95
Kalimantan Timur	2015	7.50	-0.85	31.36	28.19	14.52	-15.00
Sulawesi Utara	2011	10.10	9.82	28.48	26.13	13.86	2.33
Sulawesi Utara	2012	7.89	9.53	27.76	26.59	14.04	-0.31
Sulawesi Utara	2013	6.79	6.38	27.49	26.61	14.25	-2.05
Sulawesi Utara	2014	7.54	6.31	27.91	26.95	14.46	2.41
Sulawesi Utara	2015	9.03	6.12	28.01	27.20	14.58	3.63
Sulawesi Tengah	2011	6.78	8.13	29.42	25.89	13.63	6.50
Sulawesi Tengah	2012	3.95	8.87	29.76	26.42	13.69	-1.95
Sulawesi Tengah	2013	4.19	9.59	30.04	26.68	13.81	1.48
Sulawesi Tengah	2014	3.68	5.07	30.57	26.35	14.04	3.81
Sulawesi Tengah	2015	4.10	15.56	30.38	26.53	14.22	3.10
Sulawesi Selatan	2011	8.13	10.63	29.20	26.68	13.91	1.40
Sulawesi Selatan	2012	6.01	11.65	29.71	26.62	14.00	0.51
Sulawesi Selatan	2013	5.10	7.62	29.52	27.55	14.18	-2.24
Sulawesi Selatan	2014	5.08	7.54	29.77	27.24	14.40	4.43
Sulawesi Selatan	2015	5.95	7.15	30.15	27.21	14.51	-0.26
Sulawesi Tenggara	2011	4.69	7.71	26.09	26.74	13.74	-4.20
Sulawesi Tenggara	2012	4.14	7.91	27.86	26.71	13.85	3.54
Sulawesi Tenggara	2013	4.38	7.50	28.44	26.64	13.93	0.53
Sulawesi Tenggara	2014	4.43	6.26	28.82	27.04	14.15	4.08
Sulawesi Tenggara	2015	5.55	6.88	29.01	27.11	14.32	4.84
Gorontalo	2011	6.74	10.73	25.56	25.45	13.54	4.58
Gorontalo	2012	4.47	9.25	26.95	25.72	13.64	-0.16
Gorontalo	2013	4.15	7.67	26.71	25.97	13.98	0.46
Gorontalo	2014	4.18	7.27	25.29	25.72	14.10	4.44
Gorontalo	2015	4.65	6.23	27.66	26.62	14.29	3.55
Sulawesi Barat	2011	3.35	6.34	26.32	25.98	13.82	4.44
Sulawesi Barat	2012	2.16	7.16	26.16	25.72	13.94	5.20
Sulawesi Barat	2013	2.35	6.93	27.30	26.02	13.97	-4.47
Sulawesi Barat	2014	2.08	8.88	27.52	26.31	14.15	8.93
Sulawesi Barat	2015	3.35	7.37	27.75	26.82	14.32	1.33
Maluku	2011	10.81	6.80	25.39	26.17	13.71	6.54
Maluku	2012	7.71	6.98	25.18	25.77	13.79	-4.23
Maluku	2013	9.91	5.24	27.20	25.76	14.06	0.62
Maluku	2014	10.51	6.61	25.87	26.63	14.16	0.54
Maluku	2015	9.93	5.44	27.74	27.02	14.32	8.17
Maluku Utara	2011	5.34	3.46	27.81	26.31	13.70	2.92

Maluku Utara	2012	4.82	3.63	27.81	26.55	13.78	4.98
Maluku Utara	2013	3.80	6.36	29.11	26.93	14.00	-0.01
Maluku Utara	2014	5.29	5.48	27.96	26.78	14.18	1.81
Maluku Utara	2015	6.05	6.10	28.66	27.07	14.27	6.67
Papua Barat	2011	6.73	-4.28	26.58	27.10	14.16	3.54
Papua Barat	2012	5.42	1.72	26.60	27.43	14.19	3.52
Papua Barat	2013	4.40	7.36	27.60	27.47	14.36	2.34
Papua Barat	2014	5.02	5.44	28.34	27.81	14.44	5.94
Papua Barat	2015	8.08	4.10	28.90	28.04	14.52	3.82
Papua	2011	5.02	6.17	30.22	27.59	14.15	1.08
Papua	2012	3.71	6.86	30.09	27.66	14.23	1.08
Papua	2013	3.15	8.55	30.99	27.80	14.35	4.38
Papua	2014	3.44	3.81	30.41	28.16	14.46	4.01
Papua	2015	3.99	7.97	30.23	28.66	14.60	3.99

Sumber : Data sekunder yang diolah dari Statistik terbitan BPS

1.bTingkat Pengangguran Indonesia Menurut Provinsi (Persen) Tahun 2011 – 2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	Rata – Rata
Aceh	9,00	9,06	10,12	9,02	9,93	9,42
Sumatera Utara	8,18	6,28	6,45	6,23	6,71	6,77
Sumatera Barat	8,02	6,65	7,02	6,50	6,89	7,02
Riau	6,09	4,37	5,48	6,56	7,83	6,07
Jambi	4,63	3,20	4,76	5,08	4,34	4,40
Sumatera Selatan	6,60	5,66	4,84	4,96	6,07	5,63
Bengkulu	3,46	3,62	4,61	3,47	4,91	4,01
Lampung	6,38	5,20	5,69	4,79	5,14	5,44
Bangka Belitung	3,86	3,43	3,65	5,14	6,29	4,47
Kepulauan Riau	5,38	5,08	5,63	6,69	6,20	5,80
DKI Jakarta	11,69	9,67	8,63	8,47	7,23	9,14
Jawa Barat	9,96	9,08	9,16	8,45	8,72	9,07
Jawa Tengah	7,07	5,61	6,01	5,68	4,99	5,87
Yogyakarta	4,39	3,90	3,24	3,33	4,07	3,79
Jawa Timur	5,38	4,11	4,30	4,19	4,47	4,49
Banten	13,74	9,94	9,54	9,07	9,55	10,37
Bali	2,95	2,10	1,83	1,90	1,99	2,16
Nusa Tenggara Barat	5,25	5,23	5,30	5,75	5,69	5,44
Nusa Tenggara Timur	3,11	3,04	3,25	3,26	3,83	3,30
Kalimantan Barat	4,60	3,54	3,99	4,04	5,15	4,26
Kalimantan Tengah	3,54	3,14	3,00	3,24	4,54	3,49
Kalimantan Selatan	6,29	5,19	3,66	3,80	4,92	4,77
Kalimantan Timur	11,43	9,02	7,95	7,38	7,50	8,66
Sulawesi Utara	10,10	7,98	6,79	7,54	9,03	8,29
Sulawesi Tengah	6,78	3,95	4,19	3,68	4,10	4,54

Sulawesi Selatan	8,13	6,01	5,10	5,08	5,95	6,06
Sulawesi Tenggara	4,69	4,14	4,38	4,43	5,55	4,64
Gorontalo	6,74	4,47	4,15	4,18	4,65	4,84
Sulawesi Barat	3,35	2,16	2,35	2,08	3,35	2,66
Maluku	10,81	7,71	9,91	10,51	9,93	9,77
Maluku Utara	5,34	4,82	3,80	5,29	6,05	5,06
Papua Barat	6,73	5,42	4,40	5,02	8,08	5,93
Papua	5,02	3,71	3,15	3,44	3,99	3,86
Indonesia	6,60	6,13	6,20	5,94	6,20	6,21

Sumber : BPS, diolah

1.c Pertumbuhan Ekonomi Menurut Provinsi (persen) di Indonesia tahun 2011 - 2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	Rata – rata
Aceh	3,28	3,85	2,61	1,35	-0,72	2,07
Sumatera Utara	6,66	6,45	6,07	5,23	5,1	5,90
Sumatera Barat	6,34	6,31	6,08	5,86	5,41	6
Riau	5,57	3,76	2,48	2,7	0,22	2,95
Jambi	7,86	7,03	6,84	7,35	4,21	6,66
Sumatera Selatan	6,36	6,83	5,31	4,7	4,5	5,54
Bengkulu	6,85	6,85	6,07	5,48	5,14	6,08
Lampung	6,56	6,44	5,77	5,08	5,13	5,80
Bangka Belitung	6,9	5,5	5,2	4,67	4,08	5,27
Kepulauan Riau	6,96	7,63	7,21	6,62	6,02	6,89
DKI Jakarta	6,73	6,53	6,07	5,91	5,88	6,22
Jawa Barat	6,5	6,5	6,33	5,09	5,03	5,89
Jawa Tengah	5,3	5,34	5,11	5,28	5,44	5,29
Yogyakarta	5,21	5,37	5,47	5,16	4,94	5,23
Jawa Timur	6,44	6,64	6,08	5,86	5,44	6,09
Banten	7,03	6,83	6,67	5,47	5,37	6,27
Bali	6,66	6,96	6,69	6,73	6,04	6,62
Nusa Tenggara Barat	-3,91	-1,54	5,16	5,06	21,24	5,20
Nusa Tenggara Timur	5,67	5,46	5,41	5,05	5,02	5,32
Kalimantan Barat	5,5	5,91	6,05	5,03	4,81	5,46
Kalimantan Tengah	7,01	6,87	7,37	6,21	7,01	6,89
Kalimantan Selatan	6,97	5,97	5,33	4,85	3,84	5,39
Kalimantan Timur	6,47	5,48	2,76	2,17	-0,85	3,21
Sulawesi Utara	9,82	9,53	6,38	6,31	6,12	7,63
Sulawesi Tengah	8,13	8,87	9,59	5,07	15,56	9,44
Sulawesi Selatan	10,63	11,65	7,62	7,54	7,15	8,92
Sulawesi Tenggara	7,71	7,91	7,5	6,26	6,88	7,25

Gorontalo	10,73	9,25	7,67	7,27	6,23	8,23
Sulawesi Barat	6,34	7,16	6,93	8,88	7,37	7,34
Maluku	6,8	6,98	5,24	6,61	5,44	6,21
Maluku Utara	3,46	3,63	6,36	5,48	6,1	5,01
Papua Barat	-4,28	1,72	7,36	5,44	4,1	2,87
Papua	6,17	6,86	8,55	3,81	7,97	6,67
Indonesia	6,44	6,19	5,56	5,02	4,79	5,60

Sumber : BPS, diolah

1.d Total Investasi PMDN dan PMA (rupiah) di Indonesia tahun 2011 –

2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	Rata-rata
Aceh	464.442.50	1.734.611.40	4.789.350.00	5.500.603.00	4.483.600.00	3.394.521.38
Sumatera Utara	9.541.468.10	8.821.325.40	15.940.775.00	12.136.340.00	21.109.750.00	13.509.931.70
Sumatera Barat	1.234.887.70	1.614.150.00	1.797.450.00	1.827.955.00	2.323.350.00	1.759.558.54
Riau	9.397.289.90	16.654.282.90	20.859.000.00	24.143.980.00	18.763.900.00	17.963.690.56
Jambi	2.312.681.50	2.964.623.40	3.219.775.00	1.552.970.00	4.994.100.00	3.008.829.98
Sumatera Selatan	6.753.904.10	10.572.835.20	9.348.042.20	20.301.875.00	19.662.400.00	13.327.811.30
Bengkulu	416.270.30	348.042.20	395.025.00	250.015.00	832.000.00	448.270.50
Lampung	1.548.883.50	1.410.867.40	1.898.600.00	5.459.775.00	4.581.250.00	2.979.875.18
Bangka Belitung	1.844.898.00	1.108.805.60	1.985.100.00	1.945.700.00	2.140.150.00	1.804.930.72
Kepulauan Riau	3.372.526.10	5.263.037.80	4.285.025.00	4.949.355.00	9.257.500.00	5.425.488.78
DKI Jakarta	53.254.875.30	48.458.778.60	37.495.475.00	74.404.370.00	64.374.600.00	55.597.619.78
Jawa Barat	46.182.752.20	52.303.582.60	96.286.175.00	101.072.745.00	103.750.350.00	79.919.120.96
Jawa Tengah	4.332.575.00	8.143.997.00	18.281.275.00	19.417.270.00	26.891.100.00	15.413.243.40
Yogyakarta	220.312.00	1.159.058.20	646.400.00	1.518.395.00	1.565.250.00	1.021.883.04
Jawa Timur	21.643.756.00	43.860.038.40	76.453.575.00	60.753.375.00	70.500.700.00	54.642.288.88
Banten	24.089.302.10	31.514.503.40	49.581.150.00	33.615.530.00	45.026.900.00	36.765.477.10
Bali	4.706.777.30	7.792.076.00	7.773.225.00	5.614.160.00	8.166.705.00	6.810.588.66
Nusa Tenggara Barat	4.280.756.30	6.224.104.40	7.378.450.00	7.128.805.00	9.789.700.00	6.960.363.14
Nusa Tenggara Timur	502.121.50	98.946.60	138.875.60	193.005.00	2.239.350.00	634.459.74
Kalimantan Barat	5.966.879.10	6.673.905.00	10.484.600.00	16.445.455.00	24.174.450.00	12.749.057.82
Kalimantan Tengah	8.330.738.10	9.628.634.60	7.734.900.00	12.915.450.00	13.873.700.00	10.496.684.54
Kalimantan Selatan	4.597.947.30	6.156.011.40	11.491.550.00	8.922.875.00	15.036.600.00	9.240.996.74
Kalimantan Timur	11.998.771.20	25.462.323.80	32.393.250.00	39.787.335.00	41.760.200.00	30.280.376.00
Sulawesi Utara	2.338.282.60	1.132.330.60	871.625.00	1.319.175.00	1.458.600.00	1.424.002.64
Sulawesi Tengah	5.986.655.20	8.440.367.00	11.079.050.00	18.848.000.00	15.618.600.00	11.994.534.44
Sulawesi Selatan	4.802.824.80	7.980.606.80	6.590.300.00	8.474.795.00	12.364.850.00	8.042.675.32
Sulawesi Tenggara	213.921.00	1.254.232.60	2.246.500.00	3.280.490.00	3.972.900.00	2.193.608.72

Gorontalo	125.712.50	507.945.40	399.225.00	96.555.00	1.025.800.00	431.047.58
Sulawesi Barat	269.632.80	230.543.60	719.725.00	893.410.00	1.130.800.00	648.822.28
Maluku	106.722.10	86.003.00	652.200.00	171.605.00	1.116.900.00	426.686.02
Maluku Utara	1.196.367.40	1.198.035.40	4.404.025.00	1.395.085.00	2.799.500.00	2.198.602.56
Papua Barat	348.840.30	356.776.00	967.950.00	2.034.015.00	3.554.500.00	1.452.416.26
Papua	13.274.156.00	11.739.623.20	28.759.300.00	16.070.430.00	13.384.700.00	16.645.641.84

Sumber : BPS, diolah

1.e Pengeluaran Pemerintah Per-provinsi (rupiah) tahun 2011 – 2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	rata - rata
Aceh	1.610.313	1.000.060	1.855.440	2.407.479	2.278.118	1.830.282
Sumatera Utara	1.322.549	909.034	912.589	1.145.972	1.394.811	1.136.991
Sumatera Barat	450.395	725.887	700.403	785.888	704.695	673.454
Riau	1.409.598	1.549.481	2.687.869	1.730.359	2.901.125	2.055.686
Jambi	418.291	494.919	716.102	818.059	797.315	648.937
Sumatera Selatan	1.043.620	1.011.789	1.099.140	733.382	1.676.693	1.112.925
Bengkulu	229.697	321.610	300.141	305.054	465.402	324.381
Lampung	499.169	757.583	970.168	925.455	720.312	774.537
Bangka Belitung	424.567	322.566	482.352	161.294	310.690	340.294
Kepulauan Riau	318.025	334.380	453.128	717.994	649.113	494.528
DKI Jakarta	8.057.934	10.944.406	15.732.627	20.411.118	20.444.024	15.118.022
Jawa Barat	765.273	1.284.574	1.192.458	1.359.803	2.232.413	1.366.904
Jawa Tengah	429.058	661.685	996.050	1.570.679	2.677.093	1.266.913
Yogyakarta	150.174	217.959	292.505	442.446	698.841	360.385
Jawa Timur	900.462	1.044.767	992.143	1.207.457	2.565.946	1.342.155
Banten	653.398	1.034.968	1.600.482	1.694.484	1.855.643	1.367.795
Bali	254.413	458.097	684.647	370.585	534.517	460.452
Nusa Tenggara Barat	399.232	390.376	374.693	442.797	610.381	443.496
Nusa Tenggara Timur	193.966	205.556	232.901	407.601	562.136	320.432
Kalimantan Barat	362.379	379.521	525.615	490.219	578.136	467.174
Kalimantan Tengah	418.167	511.378	744.828	814.508	981.400	694.056
Kalimantan Selatan	633.987	526.531	999.969	1.266.884	1.126.770	910.828
Kalimantan Timur	1.993.893	2.685.939	3.441.906	2.211.317	1.744.065	2.415.424
Sulawesi Utara	223.584	351.536	359.802	506.723	651.429	418.615
Sulawesi Tengah	175.504	297.257	386.113	276.832	332.272	293.596
Sulawesi Selatan	385.823	363.804	923.792	676.237	658.602	601.652
Sulawesi Tenggara	411.987	397.001	371.271	553.493	592.535	465.257
Gorontalo	112.528	147.415	190.615	148.577	363.993	192.626
Sulawesi Barat	192.763	148.449	198.883	267.618	443.410	250.225
Maluku	230.867	155.301	154.132	369.330	545.051	290.936
Maluku Utara	268.028	339.327	494.366	427.965	569.610	419.859
Papua Barat	587.177	816.271	853.398	1.191.788	1.510.476	991.822
Papua	955.603	1.025.825	1.184.367	1.689.303	2.793.258	1.529.671

Sumber : BPS, diolah

1.f Upah Minimum Provinsi (Rupiah) tahun 2011 – 2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	Rata - rata
Aceh	1.350.000	1.400.000	1.550.000	1.750.000	1.900.000	1.590.000
Sumatera Utara	1.035.500	1.200.000	1.375.000	1.505.850	1.625.000	1.348.270
Sumatera Barat	1.055.000	1.150.000	1.350.000	1.490.000	1.615.000	1.332.000
Riau	1.120.000	1.238.000	1.400.000	1.700.000	1.878.000	1.467.200
Jambi	1.028.000	1.142.500	1.300.000	1.502.230	1.710.000	1.336.546
Sumatera Selatan	1.048.440	1.195.220	1.350.000	1.825.600	1.974.346	1.478.721
Bengkulu	815.000	930.000	1.200.000	1.350.000	1.500.000	1.159.000
Lampung	855.000	975.000	1.150.000	1.399.037	1.581.000	1.192.007
Bangka Belitung	1.024.000	1.110.000	1.265.000	1.640.000	2.100.000	1.427.800
Kepulauan Riau	975.000	1.015.000	1.365.000	1.665.000	1.954.000	1.394.800
DKI Jakarta	1.290.000	1.529.150	2.200.000	2.441.301	2.700.000	2.032.090
Jawa Barat	732.000	780.000	850.000	1.000.000	1.131.862	898.772
Jawa Tengah	675.000	765.000	830.000	910.000	1.100.000	856.000
Yogyakarta	808.000	892.660	947.114	988.500	1.108.249	948.905
Jawa Timur	705.000	745.000	866.250	1.000.000	1.150.000	893.250
Banten	1.000.000	1.042.000	1.170.000	1.325.000	1.600.000	1.227.400
Bali	890.000	967.500	1.181.000	1.542.600	1.621.172	1.240.454
Nusa Tenggara Barat	890.775	1.000.000	1.100.000	1.210.000	1.330.000	1.106.155
Nusa Tenggara Timur	800.000	925.000	1.010.000	1.150.000	1.250.000	1.027.000
Kalimantan Barat	802.500	900.000	1.060.000	1.380.000	1.560.000	1.140.500
Kalimantan Tengah	1.134.580	1.327.459	1.553.127	1.723.970	1.896.367	1.527.101
Kalimantan Selatan	1.126.000	1.225.000	1.337.500	1.620.000	1.870.000	1.435.700
Kalimantan Timur	1.084.000	1.177.000	1.752.073	1.886.315	2.026.126	1.585.103
Sulawesi Utara	1.050.000	1.250.000	1.550.000	1.900.000	2.150.000	1.580.000
Sulawesi Tengah	827.500	885.000	995.000	1.250.000	1.500.000	1.091.500
Sulawesi Selatan	1.100.000	1.200.000	1.440.000	1.800.000	2.000.000	1.508.000
Sulawesi Tenggara	930.000	1.032.300	1.125.207	1.400.000	1.652.000	1.227.901
Gorontalo	762.500	837.500	1.175.000	1.325.000	1.600.000	1.140.000
Sulawesi Barat	1.006.000	1.127.000	1.165.000	1.400.000	1.655.500	1.270.700
Maluku	900.000	975.000	1.275.000	1.415.000	1.650.000	1.243.000
Maluku Utara	889.350	960.498	1.200.662	1.440.746	1.577.000	1.213.651
Papua Barat	1.410.000	1.450.000	1.720.000	1.870.000	2.015.000	1.693.000
Papua	1.403.000	1.515.000	1.710.000	1.900.000	2.193.000	1.744.200

Sumber : BPS, diolah

1.g Pertumbuhan Penduduk Usia Produktif Menurut Provinsi (Persen) di Indonesia tahun 2011 – 2015

Provinsi	2011	2012	2013	2014	2015	Rata - rata
Aceh	1,49	1,07	3,10	3,57	2,80	2,41
Sumatera Utara	-8,94	4,13	3,60	-3,52	1,90	-0,57
Sumatera Barat	1,67	0,15	-0,78	5,20	0,61	1,37
Riau	3,52	1,97	4,54	2,74	2,82	3,12
Jambi	-5,46	1,56	-1,15	7,08	3,18	1,04
Sumatera Selatan	-0,17	3,77	-2,44	4,90	1,26	1,47
Bengkulu	1,48	2,09	-1,53	3,19	5,66	2,18
Lampung	-9,09	3,10	-0,77	4,80	-0,67	-0,52
Bangka Belitung	-6,86	4,98	2,30	2,69	4,53	1,53
Kepulauan Riau	-2,40	4,67	1,15	2,84	1,55	1,56
DKI Jakarta	-2,74	4,13	-4,33	-0,89	0,57	-0,65
Jawa Barat	2,33	5,90	0,71	1,87	-2,00	1,76
Jawa Tengah	1,01	2,86	0,06	0,13	-1,41	0,53
Yogyakarta	2,23	3,08	-1,73	3,81	-2,57	0,96
Jawa Timur	-0,07	3,35	1,31	-1,38	0,62	0,77
Banten	-4,46	2,05	0,09	3,02	-0,06	0,13
Bali	-0,95	3,41	-0,73	1,44	2,39	1,11
Nusa Tenggara Barat	-7,49	2,08	0,90	3,53	1,53	0,11
Nusa Tenggara Timur	-1,63	4,25	-0,53	3,32	2,68	1,62
Kalimantan Barat	2,96	0,65	-0,63	2,54	1,59	1,42
Kalimantan Tengah	4,87	2,65	0,92	2,96	6,65	3,61
Kalimantan Selatan	2,99	2,06	-1,76	2,15	2,37	1,56
Kalimantan Timur	4,20	2,86	-1,39	3,95	-15,00	-1,08
Sulawesi Utara	2,33	-0,31	-2,05	2,41	3,63	1,20
Sulawesi Tengah	6,50	-1,95	1,48	3,81	3,10	2,59
Sulawesi Selatan	1,40	0,51	-2,24	4,43	-0,26	0,77
Sulawesi Tenggara	-4,20	3,54	0,53	4,08	4,84	1,76
Gorontalo	4,58	-0,16	0,46	4,44	3,55	2,57
Sulawesi Barat	4,44	5,20	-4,47	8,93	1,33	3,09
Maluku	6,54	-4,23	0,62	0,54	8,17	2,33
Maluku Utara	2,92	4,98	-0,01	1,81	6,67	3,27
Papua Barat	3,54	3,52	2,34	5,94	3,82	3,83
Papua	1,08	1,08	4,38	4,01	3,99	2,91
Indonesia	-0,37	3,23	0,27	1,42	0,42	0,99

Sumber : BPS, diolah

Lampiran 2

2.a Penentuan Metode Estimasi

Pada penelitian ini, penentuan metode analisis data panel yang digunakan merujuk pada beberapa hasil pengujian. Pengujian data panel yang digunakan antara lain (i) Chow Test (likelihood Ratio Test) untuk menentukan antara Common Effect Model (CEM) atau Fixed Effect Model (FEM), (ii) Hausman Test untuk menentuka antara FEM atau Random Effect Model (REM).

Penentuan antara CEM atau FEM (Chow Test)

Redundant Fixed Effects Tests
Pool: POOL01
Test cross-section fixed effects

Effects Test	Statistic	d.f.	Prob.
Cross-section F	16.436482	(32,127)	1.1832
Cross-section Chi-square	270.161123	32	1.0897

Sumber : Data sekunder (lampiran1a) yang diolah dengan eviws 8.0

Hipotesis:

H0: Model CEM

H1: Model FEM

Kesimpulan: Nilai Prob.Chi-square adalah 1.0897 dengan nilai tabel pada df (32) $\alpha = 0,1$ sehingga P.Chi-square > P-value, maka H0 di terima sehingga model data yang digunakan adalah Common Effect Model .

2.b Hasil Estimasi dengan Common Effect Model

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 10/06/17 Time: 18:48
Sample: 2011 2015
Included observations: 5
Cross-sections included: 33
Total pool (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	-4.720434	6.665716	-0.708166	0.4799
X1?	-0.037788	0.060188	0.627827	0.0531
X2?	-0.036773	0.130323	0.282165	0.7782
X3?	-1.303375	0.256977	5.071961	0.0000

X4?	0.891343	0.452013	-1.971942	0.0504
X5?	0.293293	0.039853	-7.359291	0.0000
<hr/>				
R-squared	0.385940	Mean dependent var	5.744242	
Adjusted R-squared	0.366630	S.D. dependent var	2.286612	
S.E. of regression	1.819790	Akaike info criterion	4.071006	
Sum squared resid	526.5503	Schwarz criterion	4.183949	
Log likelihood	-329.8580	Hannan-Quinn criter.	4.116853	
F-statistic	19.98644	Durbin-Watson stat	0.486534	
Prob(F-statistic)	0.000000			

Sumber : Data sekunder (lampiran1a) yang diolah dengan eviews 8.0

2.c Hasil Estimasi dengan Fixed Effect Model

Dependent Variable: Y?
Method: Pooled Least Squares
Date: 10/06/17 Time: 18:50
Sample: 2011 2015
Included observations: 5
Cross-sections included: 33
Total pool (balanced) observations: 165

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	3.885527	6.450810	0.602332	0.5480
X1?	0.003070	0.036568	0.083945	0.9332
X2?	-0.012116	0.141239	-0.085783	0.9318
X3?	-0.493771	0.267923	-1.842958	0.0677
X4?	0.103584	0.331752	0.312232	0.7554
X5?	0.300797	0.072813	4.131114	0.0001
Fixed Effects (Cross)				
ACEH—C	5.430015			
SUMUT—C	1.536564			
SUMBAR—C	1.942236			
RIAU—C	2.031975			
JAMBI—C	-1.122302			
SUMSEL—C	-0.289105			
BENGKULU--C	-2.778589			
LAMPUNG--C	-0.230241			
BANGBEL--C	-1.674377			
KEPRI—C	0.225671			
DKI—C	3.533581			
JABAR—C	4.368294			
JATENG—C	-1.139045			
YOGYAKARTA--C	-4.627940			
JATIM—C	-2.424269			
BANTEN—C	5.435643			
BALI—C	-6.666017			
NUSTENGBAR--C	-0.141673			
NUSTENGTIM--C	-2.053211			
KALBAR—C	-2.341968			
KALTENG--C	-2.941045			

KALSEL—C	-1.749130
KALTIM—C	4.365585
SULUT—C	2.857824
SULTENG--C	-0.435890
SULSEL—C	1.231859
SULTENG--C	-0.435890
GORONTALO--C	-0.832454
SULBAR—C	-3.700276
MALUKU—C	5.045763
MALUT—C	0.348021
PABAR—C	0.634874
PAPUA—C	-3.404481

Effects Specification

Cross-section fixed (dummy variables)

R-squared	0.880567	Mean dependent var	5.744242
Adjusted R-squared	0.845772	S.D. dependent var	2.286612
S.E. of regression	0.897995	Akaike info criterion	2.821544
Sum squared resid	102.4123	Schwarz criterion	3.536853
Log likelihood	-194.7774	Hannan-Quinn criter.	3.111913
F-statistic	25.30704	Durbin-Watson stat	1.911694
Prob(F-statistic)	0.000000		

Sumber : Data sekunder (lampiran1a) yang diolah dengan eviews 8.0

2.d Hasil Estimasi dengan Random Effect Model

Dependent Variable: Y?

Method: Pooled EGLS (Cross-section random effects)

Date: 10/06/17 Time: 18:51

Sample: 2011 2015

Included observations: 5

Cross-sections included: 33

Total pool (balanced) observations: 165

Swamy and Arora estimator of component variances

Variable	Coefficient	Std. Error	t-Statistic	Prob.
C	4.819326	5.457032	0.883140	0.3785
X1?	0.018380	0.035632	0.515818	0.6067
X2?	0.073854	0.122346	0.603648	0.5469
X3?	0.125692	0.233878	0.537425	0.5917
X4?	-0.351062	0.304697	-1.152165	0.2510
X5?	0.003660	0.052957	0.069117	0.9450
Random Effects (Cross)				
ACEH--C	3.516019			
SUMUT--C	0.845106			
SUMBAR--C	1.274722			
RIAU--C	0.190516			
JAMBI--C	-1.206794			
SUMSEL--C	-0.188756			
BENGKULU--C	-1.406121			

LAMPUNG--C	-0.281629
BANGBEL--C	-0.992205
KEPRI--C	0.091020
DKI--C	2.758509
JABAR--C	2.727415
JATENG--C	-0.141268
YOGYAKARTA--C	-1.729221
JATIM--C	-1.695608
BANTEN--C	4.079948
BALI--C	-3.382857
NUSTENGBAR--C	-0.286268
NUSTENGTIM--C	-2.050542
KALBAR--C	-1.440632
KALTENG--C	-2.121267
KALSEL--C	-0.943552
KALTIM--C	2.564281
SULUT--C	2.541537
SULTENG--C	-0.940049
SULSEL--C	0.282752
SULTENG--C	-0.940049
GORONTALO--C	-0.577973
SULBAR--C	-2.633848
MALUKU--C	4.066790
MALUT--C	-0.508849
PABAR--C	0.389185
PAPUA--C	-1.860310

Effects Specification		S.D.	Rho
Cross-section random		1.491714	0.7340
Idiosyncratic random		0.897995	0.2660

Weighted Statistics			
R-squared	0.011265	Mean dependent var	1.493283
Adjusted R-squared	-0.019828	S.D. dependent var	1.018182
S.E. of regression	1.028226	Sum squared resid	168.1026
F-statistic	0.362298	Durbin-Watson stat	1.086450
Prob(F-statistic)	0.873690		

Unweighted Statistics			
R-squared	0.037158	Mean dependent var	5.744242
Sum squared resid	825.6268	Durbin-Watson stat	0.221208

Sumber : Data sekunder (lampiran1a) yang diolah dengan eviews 8.0

Lampiran 3**BIODATA****Identitas Diri**

Nama : Andi Septian Eka Prasetyo

Tempat, Tanggal Lahir : Jakarta, 15 September 1992

Jenis Kelamin : Laki - Laki

Alamat Rumah : Jalan Cendrawasih no.100

Nomor HP : 082346524444

Alamat *E-mail* : Prasetyoseptian3@gmail.com

**Riwayat Pendidikan**

- Pendidikan Formal

1. SD Kartika Wirabuana – I Makassar Tahun 1999 - 2005
2. SMP Kartika Wirabuana – I Makassar Tahun 2005-2008
3. SMA Kartika Wirabuana – I Makassar Tahun 2008-2011

Pengalaman Organisasi

1. Pengurus Himpunan Mahasiswa Jurusan Ilmu Ekonomi Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Periode 2014 - 2015
2. Ketua Majelis Permusyawaratan Mahasiswa Fakultas Ekonomi dan Bisnis Universitas Hasanuddin Periode 2015 – 2016
3. Pengurus Organisasi Lingkungan Hidup Mahesa Periode 2014 – 2015
4. Pengurus Organisasi Lingkungan Hidup Mahesa Periode 2015 – 2016
5. Pengurus Organisasi Lingkungan Hidup Mahesa Periode 2016 - 2017

Demikian biodata ini dibuat dengan sebenarnya.

Makassar, 19 Oktober 2017

Andi Septian Eka Prasetyo